RESPON TIONGKOK ATAS PENCABUTAN PASAL 370 KONSTITUSI INDIA TENTANG STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional



Oleh: NAYLA KARIMAH NIM. 172216045

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA AGUSTUS 2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama

: Nayla Karimah

NIM

: 172216045

Program Studi

: Hubungan Internasional

Judul Skripsi

: Respon Tiongkok atas Pencabutan Ppasal 370 Konstitusi India

tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

 Skripsi ini tidak pernah dikumpulan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik dimanapun.

- Skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain.
- Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai hasil dari plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang diberikan.

Surabaya, 28 Juli 2020

Yang menyatakan,

Nayla Karimah

NIM. 172216045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Nayla Karimah

NIM

: 172216045

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul "Respon Tiongkok atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 13 Agustus 2020

mbimbing

NIP 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Nayla Karimah yang berjudul: "Respon Tiongkok atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019", telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji pada tanggal 13 Agustus 2020

TIM PENGUJI SKRIPSI

Zaly Ismail M S I

NIP. 198212302011011007

Penguji II

Moh. Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

Pęnguji III

Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NUP. 201409001

Penguji IV

Muhammad Qobidl 'Ainul Aril, S.I.P., M.A.

NIP. 198408232015031**0**02

Surabaya, 13 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akn. Marki, Grad.Dip.SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Nayla Karimah
NIM	: 172216045
Fakultas/Jurusan	: FISIP/ Hubungan Internasional
E-mail address	: naylaokrek@gmail.com
Sunan Ampel Sura Sekripsi yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN daya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () Atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India Tentang Status Khusus Wilayah nir Tahun 2019
Perpustakaan UII mengelolanya d menampilkan/mer akademis tanpa p penulis/pencipta d Saya bersedia untu	yang dipedukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan. ak menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan egala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya
Demikian pernyata	nan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021 M

Penulis

ABSTRACT

Nayla Karimah, 2020, Chinese Response to Revocation of Article 370 of the Indian Constitution on the Special Status of Jammu and Kashmir in 2019, Thesis of the International Relations Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: National Interest, Chinese Response, Special Status, Jammu and Kashmir

This research tries to answer how China's response to the repeal of Article 370 of the Indian Constitution regarding the special status of the Jammu and Kashmir region in 2019. The method used is descriptive qualitative with interviews and documentation as data collection techniques. This study uses a diplomatic approach with the concept of national interest according to Morgenthau as a knife of analysis, China's response to the repeal of Article 370 of the Indian Constitution is in accordance with the concept of national interest according to Morgenthau. China's national interests lead to national security and protection of the country's sovereignty. In addition, China's response is more diplomatic than positive because it has an impact on the existence of China's territory, namely Aksai Chin. The reason is that the national interests and national benefits obtained by China tend to be less and more likely to threaten China's sovereign territory.

ABSTRAK

Nayla Karimah, 2020, Respon Tiongkok atas Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India Tentang Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Respon Tiongkok, Status khusus, Jammu dan Kashmir

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada tahun 2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan diplomatik dengan konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau sebagai pisau analisa, respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India sesuai dengan konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau. Kepentingan nasional Tiongkok mengarah pada keamanan nasional dan perlindungan kedaulatan negara. Selain itu respon Tiongkok lebih bersifat diplomatik negatif daripada positif dikarenakan berdampak pada keberadaan wilayah kekuasaan Tiongkok yaitu Aksai Chin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	V
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	XV
DAFTAR GAMBAR	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual	8
1. Respon	8
2. Pencabutan (Revocation) Status Khusus	10
3. Status Khusus Wilayah Jammu dan Kashmir	11
F. Tinjauan Pustaka	12

G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3. Subyek dan Objek Penelitian	24
4. Tahap-tahap Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Teknik Analisa Data	30
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data	31
F. Argumentasi Utama	32
G. Sistematika Pembah <mark>asa</mark> n	32
BAB II: INTERVENSI TI <mark>O</mark> NG <mark>KOK DI J</mark> AMM <mark>U</mark> DAN KASHMIR	35
A. Pembagian Line of Control Wilayah Jammu dan Kashmir	35
B. Keterlibatan Tiongkok di Jammu dan Kashmir	39
C. Kepentingan Tiongkok di balik OBOR (One Belt One Road)	44
BAB III: PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN	
KASHMIR	48
A. Pecabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang Status Khusus Wilayah	
Jammu dan Kasmir	48
B. Dampak Pencabutan Pasal 370 Bagi Tiongkok	50
BAB IV: STRATEGI DAN RESPON TIONGKOK ATAS PENCABUTAN	
STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR	52
Strategi Tiongkok dalam Merespon Isu Kashmir	52

2. Respon Diplomatik Tiongkok atas Pencabutan Status Khusus wilayah	
Jammu dan Kashmir	55
BAB V: KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK ATAS WILAYAH	
JAMMU DAN KASHMIR	59
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara	77
2. Artikel 370 Konstitu <mark>si I</mark> ndia t <mark>ent</mark> an <mark>g S</mark> tatus <mark>K</mark> husus wilayah Jammu dan	
Kashmir	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Analisa Data......60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pembagian Wilayah Kashmir	3
Gambar 2: Pembagian Line of Control Jammu dan Kashmir	38
Gambar 3: Peta Aksai Chin	43
Gambar 4: OBOR- Silk Road	46
Gambar 5: Highways Network of CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara Narasumber 1	.77
2. Wawancara Narasumber 2	. 79
Lampiran 2: Artikel 370 Konstitusi India tentang Status Khusus wilayah Jammu	
dan Kashmir	. 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di wilayah Asia Selatan terdapat negara yang menjadi wilayah jajahan Inggris yaitu negara India dan Pakistan. Inggris mulai menjajah India melalui bidang perdagangan yang dilakukan oleh *English East India Company* (EIC). Ketika kolonial Inggris menjajah India, mereka sangatlah berkuasa. Sehingga memunculkan kesadaran berbangsa pada masyarakat India untuk segera merdeka. Setelah peristiwa tersebut terjadi, munculah suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Kebangsaan India. Gerakan kebangsaan tersebut telah berhasil memenangkan kemerdekaan kepada India dan Pakistan dengan waktu yang berbeda. India merdeka pada 14 Agustus 1947 sedangkan untuk Pakistan merdeka pada 15 Agustus 1947.

Ketika Kolonial Inggis menjajah India, mereka memberikan kemerdekaan kepada negara India dan Pakistan dengan berbagai alasan dan salah satu alasannya yaitu karena terdapat konflik keagamaan di dalam India dan mengakibatkan terpecahnya India menjadi dua wilayah negara yaitu India dan Pakistan. Dengan adanya konflik tersebut jugalah yang merupakan salah satu faktor intern antara kedua negara tersebut dan mengakibatkan munculnya negara baru, yakni Pakistan. Terpecahnya India menjadi dua bagian negara

¹ Musidi, *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah Sampai Terbentuknya Bangladesh* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), 100.

² *Ibid.*, 138.

² Shidt, Gusta, Kashmir a Study in India-Pakistan relations (New Delhi: The India Council

yakni India dan Pakistan menimbulkan konflik perebutan wilayah yang tak kunjung usai. Wilayah tersebut yaitu Jammu dan Kashmir.³

Problema perebutan wilayah Jammu dan Kashmir bermula ketika masyarakat Muslim di India memilih untuk mendirikan negara sendiri dikarenakan ingin mendirikan negara seniri yang berpegang teguh pada agama islam yang secara resmi dinamakan Pakistan. Persoalan muncul terkait dengan wilayah Jammu dan Kashmir yang penduduknya mayoritas beragama Muslim, namun pemimpinnya beragama Hindu.⁴

Sedangkan pada Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir yang berstatus sebagai wilayah dari Negara Kepangeranan (Indian Princely States) yang telah diberikan pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian di antara dua negara yaitu India atau Pakistan.⁵

Sejarah bermula ketika Hari Singh sebagai pemimpin Kashmir, berpikir untuk tidak bergabung pada salah satu dari kedua negara tersebut dan ingin menciptakan negara yang baru lagi. Sedangkan Pada 27 Oktober 1947 Hari Singh menyatakan untuk bergabung dengan India tanpa persetujuan penduduknya dan kemudian meninggal dunia pada 1961.⁶

Peristiwa itulah yang menyebabkan beberapa penduduk Kashmir yang beragama Islam dan penduduk Pakistan beragama Islam tidak menerima karena keputusan sepihaknya. Keputusan Hari Singh saat itulah yang akhirnya

³ Sisir Gupta, *Kashmir a Study in India-Pakistan relations* (New Delhi: The India Council of World Affair, 1967), 23.

⁴ Dhurorudin Mashad, Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai (Jakarta: Pustaka Al-

Information Service of India, Masalah Kashmir (Djakarta: Information Service of India). 5

⁶ *Ibid*,. 121.

menempatkan Kashmir sebagai wilayah sengketa tak terselesaikan hingga saat ini.



Gambar 1. Pembagian wilayah Kashmir

Jammu dan Kashmir merupakan wilayah dengan luas sekitar 222.235 km, di Utara berbatasan dengan India dan di bagian barat berbatasan dengan negara Pakistan. India menguasai kurang lebih sekitar 100.568 km di wilayah Kashmir tahun 2001, jumlah penduduk India mencapai 10.069.917 jiwa sedangkan Pakistan menguasai wilayah Kashmir sekitar 78.934 km, dengan jumlah penduduk kurang lebih 3 juta jiwa⁸. Jammu dan Kashmir merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara Pakistan, dan India. Jammu dan Kashmir terletak di kaki gunung Himalaya memang patut mendapakan julukan

⁷BBC News. 2019. "Kashmir Territories Profile" diakses 30 Januari 2020, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11693674

⁸ Bradshaw Dkk, "Contemporary World Regional Geography" (McGraw-Hill, New York 2007). 300

surga. *A garden of eternal spring an iron fort to a place of kings* menjadi julukan Jammu dan Kashmir atas keindahan alamnya yang luar biasa. ⁹

Wilayah Jammu dan Kashmir memiliki keuntungan yang luar biasa dalam bidang ekonomi. Jammu dan Kashmir merupakan obyek wisata yang menggiurkan, pusat indutri wol, karpet, serta tanahnya yang subur. Mengalirnya sungai-sungai besar Indus, Jhelum juga bagus untuk sektor pertanian. Dibidang militer, lembah Kashmir adalah tempat yang sangat strategis bagi pertahanan negara. Wilayahnya yang memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah dengan banyak perbatasan negara seperti Tiongkok dan Afganistan. Letak wilayah Jammu dan Kashmir yang strategis menjadi keuntungan geopolitik bagi mereka dan posisi inilah yang juga menyebabkan wilayah ini semakin diperebutkan. Maka tidak heran apabila India dan Pakistan memperebutkan Jammu dan Kashmir hingga saat ini. 10

Berbagai usaha untuk melakukan resolusi konflik telah ditempuh oleh kedua negara, salah satunya dengan pengajuan pada PBB (Perserikatan bangsabangsa). India membawa kasus ini ke PBB dan dilembagakan dalam dua resolusi kardinal PBB yang disahkan pada tahun 1948-1949. Namun, itu tidak pernah diadakan dan India tidak menghormati janjinya. Pakistan menganggap janji India untuk mengikat saat ini seperti pada saat pertama kali secara sukarela dibuat pada

⁹ Alfy Rizky. 2016. "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013". JOM FISIP Vol 3 No.2 .1 Universitas Riau.

¹⁰ *Ibid.*. 1.

_

tahun 1947-1948. Politisi India telah menggunakan isu ini untuk menakuti publik mereka bahwa India mungkin bubar jika Jammu dan Kashmir memisahkannya.¹¹

Perebutan wilayah Jammu dan Kashmir yang terus menerus terjadi memberikan dampak bagi negara di sekitarnya, salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara yang letak geografisnya berdekatan dengan wilayah Kashmir, India dan Pakistan. Tiongkok telah mengklaim bahwa mereka memiliki dan menguasai sebagian Kashmir yaitu satu wilayah yang disebut Aksai Chin di wilayah bagian timur laut Kashmir, setara dengan 20% dari Kashmir terkena imbas dalam kedaulatan wilayah yang pasti ada beberapa dampak dan risiko yang lebih dipertanyakan oleh Tiongkok. 12

Hingga pada Agustus 2019 bertepatan dengan hari kemerdekaan India yang ke-72, kenaikan eskalasi konflik terjadi di wilayah tersebut. Mulanya Perdana Menteri India yang bernama Narendra Modi mencabut otonomi daerah, Pasal 370 Konstitusi India setelah 7 dasawarsa mengenai "Jammu dan Kashmir tidak lagi menjadi wilayah istimewa" dimana isi dalam Pasal 370 Konstitusi India yang berlaku pada 1954 hingga 2019 ini adalah bahwa Jammu dan Kashmir diperbolehkan memiliki konstitusi sendiri, kemerdekaan atas semua hal terkecuali untuk urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi. ¹³ India berpendapat bahwa

¹¹ *Ibid*,. 37.

Panda Suryawijaya. 2019. "Sejarah Konflik India-Pakistan, Mengapa Keduanya Memperebutkan Kashmir" diakses pada 4 Desember 2019, https://www.google.com/amp/dunia/sejarah-konflik-india-pakistan-mengapa-keduanya-memperebutkan-Kashmir.html

National portal of India. 2015. "Constitution of India (Full Text)" diakses 27 Januari 2020, https://www.india.gov.in/gsearch?s=370&op=cari.

pencabutan Pasal 370 Konstitusi India adalah untuk mengintegrasikan Kashmir dan meletakkannya pada posisi yang sama dengan seluruh wilayah India. 14

Hal ini memunculkan beberapa respon dari kritikus dan beberapa negara, mereka menentang langkah tersebut dimana mereka menganggap bahwa penghapusan Pasal 370 Konstitusi India berkaitan dengan perlambatan ekonomi yang sedang dihadapi India saat ini. Mereka mengatakan bahwa langkah tersebut memberikan pengalihan yang sangat dibutuhkan bagi pemerintah India. 15

Sementara pada peristiwa ini Tiongkok menganggap bahwasanya India telah melukai kedaulatan Tiongkok dengan mengubah hukum domestik secara sepihak, melalui pernyataan juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok. Yang menjadi masalah bagi Tiongkok saat ini adalah apa yang akan terjadi dengan Aksai Chin yaitu hamparan padang pasir dataran tinggi luas yang menjadi wilayah klaim dan kekuasaan Tiongkok. 16

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengatahui lebih lanjut bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tetang status wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019 sehubung dengan kepentingan nasional Tiongkok megenai kedaulatan negaranya yang terganggu.

¹⁵ BBC.news. 2019. "Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir Oleh India dianggap Kontroversial? Tiga yang Layak diketahui" diakses 4 Desember 2019 https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia.

¹⁴ Matapolitik. 2019. "Pencabutan Pasal 370: Ketika Kashmir Tak Lagi Istimewa" diakses 4 Desemer 2019, https://www.matapolitik.com/cabut-pasal-370-ada-apa-dengan-Kashmir-dansignifikansi-bagi-pakistan-news/.

¹⁶ Matapolitik. 2019. "Dibanding India dan Pakistan, China Lebih Paham Risiko di Kashmir" diakses 4 Desember 2019, https://www.matapolitik.com/bukan-india-atau-pakistanchina-tampak-lebih-paham-risiko-di-Kashmir-analisis/.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir Tahun 2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini tidak lain juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari kajian atau penelitian ini tidka lain untuk memperkaya pengetahuan dalam keilmuan Hubungan Internasional di negara Indonesia, utamannya mengenai kajian tentang keamanan internasional dan kepentingan nasional suatu negara, yang tidak kalah menarik adalah: penelitian ini membahas tentang bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Bedasarkan penelusuran terhadap sumbersumber pustaka terkait kajian mengenai respon Tiongkok atas konflik Kashmir cukup minim. Kebanyakan penelitian membahas tentang bagaimana respon India dan Pakistan. Pada konflik yang terjadi di Kashmir mempunyai dampak yang besar bagi Tiongkok juga karena manyangkut pada kedaulatan Tiongkok.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaaat secara praktis, yaitu sebagai bahan kajian, penelitian dan analisis untuk mengetahui bagaimana diagnosa respon Tiongkok atas pecabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Sehingga diharapkan Pemerintah dari 3 negara yaitu India, Pakistan dan Tiongkok akan lebih efektif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan yang melibatkan negara lain utamanya dalam ranah kedaulatan negara.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk menjadi reverensi peneliti dalam menjawab rumusan masalah di penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Respon

Respon menurut KBBI adalah suatu tanggapan, reaksi ataupun jawaban. Sedangkan menurut Soekanto respon adalah sebagai konsekuensi dari tanggapan ataupun jawaban dari perilaku yang sebelumnya sudah dilakukan. Sementara menurut Susanto respon merupakan suatu reaksi. ¹⁷

Respon mempunyai dua bentuk, yaitu:

• Respon Positif

Pengertian repon positif adalah apabila suatu masyarakat atau negara mempunyai tanggapan, reaksi positif atau baik. Dimana

¹⁷ Wildan Al-Kausar. 2018. "Respon Masyarakat Kota Malang terhadap City Branding Indah Malang" diakses 5 November 2019, Eprint.umm.ac.id.

mereka secara antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi ataupun kelompok.

Respon Negatif

Pengertian respon negatif adalah apabila suatu masyarakat atau negara mempunyai tanggapan, reaksi negative atau buruk. Dimana mereka kurang antusias bahkan tidak antusias untuk ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi ataupun kelompok.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, respon adalah suatu tanggapan, reaksi ataupun jawaban yang merupakan akibat dari perilaku yang telah dilakukan. Respon juga terbagi menjadi dua macam, yaitu positif dan negatif. Respon positif apabila suatu masyarakat memberi rangsangan baik serta ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program. Sedangkan respon negatif adalah apabila suatu masyarakat memeberikan respon sebaliknya yaitu rangsangan kurang baik serta kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau program.

Dalam hubungan internasional, respon suatu negara bisa terbagi atas beberapa macam, salah satunya adalah respon diplomatik. Respon diplomatik merupakan respon yang menjelskan bagaimana suatu negara merespon suatu isu dengan cara yang damai tanpa ada kekerasan aaupun perang. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan atas Kashmir sudah memunculkan beberapa respon diplomatik antara kedua negara tersebut.

¹⁸ *Ibid*,. 9.

Salah satunya adalah diplomasi kriket (menuju perundingan damai). Diplomasi kriket ini pertama kali dimulai pada 1987, ketika itu pemimpin Pakistan Zia-ul Haq diundang ke Jaipur untuk menonton pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Seusai pertandingan itu, Perdana Mentri India Rajiv Gandhi mengadakan pertemuan bilateral terkait penyelesaian kasus Kashmir. Diplomasi ini kemudian berlanjut pada tahun 2005 dan 2011.¹⁹

2. Pencabutan (Revocation) Status Khusus

Pemerintah India melakukan pencabutan (*Revocation*) Pasal 370 konstitusi India, status khusus Jammu dan Kashmir melalui keputusan Presiden India yang disampaikan di parlemen pada 5 Agustus 2019 dan menimbulkan pro kontra dai berbagai pihak. Pencabutan Pasal yang dianggap ini dianggap penting karena menjamin otonomi luas bagi negara bagian tersebut. Peristiwa pengumuman pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir ini tidak lama terjadi setelah ribuan pasukan tambahan dikirim ke Jammu dan Kashmir. Bahkan layanan internet dan telepon dimatikan di sejumlah daerah dan kemungkinan akan terjadinya aksi demonstrasi skala besar menentang pemerintah pusat.²⁰

¹⁹ Ahmad Burhan Hakim. 2015. "Analisa Konflik Perbatasan (Khasmir) India-Pakistan" diakses 9 Desember 2019, https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/www.burhanhernandez.com/analisa-konflik-perbatasan-khasmir-india-pakistan.

BBC News 2019. "Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters" diakses 6 Desember 2019, https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india.

3. Status Khusus

Jammu dan Kashmir adalah wilayah yang terletak di bagian utara anak benua India di sekitar Karakoram dan pegunungan Himalaya paling barat. Wilayah ini menjadi subyek perselisihan antara India, Pakistan dan China sejak pembagian anak benua pada 1947. Kashmir merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara Pakistan, dan India. Wajar apabila wilayah Jammu dan Kashmir mendapatkan julukan surga. A garden of eternal spring an iron fort to a place of kings yang juga menjadi julukan Jammu dan Kashmir atas keindahan alamnya yang luar biasa juga patut diberikan. 22

Wilayah Jammu dan Kashmir memiliki keuntungan yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang militer, bidang pariwisata dan sektor peranian. Di dalam bidang ekonomi, Kashmir merupakan obyek wisata yang menggiurkan, pusat indutri wol, karpet, serta tanahnya yang subur. Mengalirnya sungai-sungai besar Indus, Jhelum juga bagus untuk sektor pertanian. Dibidang militer, lembah Kashmir adalah tempat yang sangat strategis bagi pertahanan negara.

Wilayahnya yang memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah dengan banyak perbatasan negara seperti Tiongkok dan Afganistan.

Letak wilayah Kashmir yang strategis menjadi keuntungan geopolitik bagi mereka dan posisi inilah yang juga menyebabkan wilayah ini semakin

²¹ Rais Akhtar, William Kirk. 2019 "Jammu and Kashmir" diakses 6 Desember 2019, https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir.

²² Alfy Rizky. 2016. "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013" JOM FISIP Vol 3 No.2 .1 Universitas Riau

diperebutkan. Maka tidak heran apabila India dan Pakistan memperebutkan Jammu dan Kashmir hingga saat ini.

Pada tahun 1949, konstitusi khusus untuk wilayah Jammu dan Kashmir telah ditambahkan dalam konstitusi India yaitu pasal 370 atau biasa disebut artikel 370. Dimana Pasal tersebut berisi tentang bagaimana Jammu dan Kashmir memiliki konstitusi mereka sendiri, bendera mereka sendiri dan kemerdekaan atas semua hal terkecuali untuk urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Ditambahkan lagi ketentuan di bawah Pasal 370-35A yang isinya memberikan hak istimewa khusus untuk penduduk tetap, termasuk pekerjaan pemerintah negara bagian dan hak ekslusif untuk memiliki property di negara bagian.²³

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019 adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk respon Tiongkok dalam merespon dicabutnya status khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019 khususnya respon diplomatik yang positif ataupun negatif. Untuk menguatkan sebagai bahan pembanding sekaligus pelengkap data, dalam penelitian ini, dijelaskan oleh peneliti mengenai beberapa penelitian yang memiliki beberapa keterkaitan dengan topik dalam penelitian wilayah Jammu dan Kashmir ini.

_

²³ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Book Review "The National Interest in International Relations Theory". IJIS Vol.1, No.2, (Yogyakarta: 2014).

Penelitian pertama adalah karya Heri Kurniawan dalam *Konflik India*Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M).²⁴

Penelitian ini merupakan skripsi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi timbulnya konflik antara India dan Pakistan dalam memperebutkan Kashmir secara historis dalam pandangan aspek politik.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat resolusi melalui plebisit yang sesuai dengan resolusi yang termuat dalam PBB pada perang yang terjadi pertama kali antara India-Pakistan. Namun resolusi ini tidak dapat terselesaikan karena terdapat rekayasa politik India sehingga resolusi ini tidak dapat terealisasikan karena juga didukung oleh kepentingan India.

Berbeda dengan skripsi dari penulis yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Dimana kedaulatan Tiongkok terganggu akibat adanya konnflik ini. Sedangkan kesamaan antara kedua peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kepentingan nasional suatu negara.

Penelitian kedua ini adalah karya Santosh Singh dalam *China's Kashmir Policy* Berfokus pada kebijakan Kashmir China dan membahas tentang sejarah perselisihan Kashmir. Jurnal ini merupakan jurnal isu internasional. Jurnal ini membahas bagaimana Tiongkok mempetanyakan legitimasi klaim India atas Kashmir, sejalan dengan aliansinya yaitu Pakistan. Dimana Tiongkok

²⁴ Heri Kurniawan. "Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)", Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

menggunakan Kashmir yang diduduki Pakistan sebagai rute transit antara Xinjiang dan pelabuhan Pakistan di Laut Arab.

Penelitian ketiga adalah karya Reksi Merindo dalam *Analisis Respon Tiongkok dalam Sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018).*²⁵ Penelitian ini merupakan skripsi program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini membahas respon Tiongkok dalam sengketa nuklir Korea Utara pada masa kepemimpinan Xi Jinping menggunakan teori *rational choice* dari *rational actor*. Dalam penelitian ini, Tiongkok memilih untuk mengaplikasikan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara didasari atas keamanannya yang terganggu sehingga membuat Tiongkok mengalami dilema. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana peneliti memilih menggunakan konsep kepentingan nasional.

Penelitian keempat adalah karya Heri Kurniawan dalam *Konflik India Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M).*²⁶ Penelitian ini merupakan skripsi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi timbulnya konflik antara India dan Pakistan dalam memperebutkan Kashmir secara historis dalam pandangan aspek politik. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat resolusi melalui plebisit yang sesuai dengan resolusi yang termuat dalam PBB pada perang yang terjadi

Reksi Merindo. "Analisis Respon Tiongkok dalam Sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018)" skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2019.

²⁶ Heri Kurniawan. "Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)", Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

pertama kali antara India-Pakistan. Namun resolusi ini tidak dapat terselesaikan karena terdapat rekayasa politik India sehingga resolusi ini tidak dapat terealisasikan karena juga didukung oleh kepentingan India.

Berbeda dengan skripsi dari penulis yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Dimana kedaulatan Tiongkok terganggu akibat adanya konnflik ini. Sedangkan kesamaan antara kedua peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kepentingan nasional suatu negara.

Penelitian kelima adalah karya adalah karya Monica Krisna Ayunda dan Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd dalam *Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir beserta Dampaknya* (1947-1970).²⁷ Penelitian ini merupakan jurnal jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahi bagaimana konflik yang terjadi antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir pada tahun 1947-1970, beserta dampaknya yang ditinjau dari perspektif historis. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni berpedoman pada pendapat menurut Kuntowijoyo, yang memiliki beberapa tahapan.Adapun tahapan tersebut yaitu; pemilihan topik, heuristik atas pengambilan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpreatsi atau penafsiran, dan terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.

Berbeda dengan skrispi dilakukan peneliti yang membahas lebih kepada bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India

Monika krisna dan Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd. "Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir beserta Dampaknya (1947-1970)". Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 2017

tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Sedangkan persamaan dengan peneltian yang akan dilakukan peneliti adalah dampak konflik India-Pakistan.

Penelitian keenam adalah karya Riadhi Alhayyan dalam Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional. 28 Penelitian ini merupakan skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum Internasional. Menurut hukum Internasional, Kashmir menjadi wilayah sengketa karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka. Sengketa Kashmir juga terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Penelitian ini sangatlah membantu penleiti untuk mengetahui bagaimana sejarah terjadinya konflik India dan Pakistan dengan perspektif hukum Internasional.

Penelitian ketujuh adalah karya Penelitian ketujuh adalah karya Alfy Rizky dalam *Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir terhadap Hubungan diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013.*²⁹ Penelitian ini merupakan jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Riau. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perebutan wilayah Kashmir terhadap hubungan diplomatik India dan Pakistan terutama dalam perspektif resolusi konflik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisis

²⁸ Riadhi Alhayyan "Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional". Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2012.

²⁹ Alfy Rizky. "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan periode 2011-2013". Universitas Riau, Riau, 2016.

negara-negara yang berfokus kepada pengambilan keputusan pada situasi apapun. Peneliti ini menggunakan perspektif realisme dalam hubungan internasional dan konsep keamanan nasional. Berbeda dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif realisme. Sedangkan persamaan dengan penetian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsinya adalah sama-sama menggunakan tingkat analisis negara.

Penelitian kedelapan adalah karya Nurhasanah dalam *Dampak Peristiwa*Bom Mumbai November 2008 terhadap Penyelesaian Konflik Kashmir antara

India dan Pakistan Periode 2008-2012.³⁰ Penelitian ini merupakan skripsi
prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini
bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak peristiwa bom Mumbai
November 2008 terhadap penyelesaian konflik antara India dan Pakistan
periode 2008-2012. Penelitian ini merupakan skripsi jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kerangka teoritis yang
digunakan dalam skripsi ini adalah teori konflik. Konsep kepentingan dan
konsep keamanan nasional. Metode yang dilakukan peneliti adalah metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi
kepustakaan.

Berbeda dengan skripsi penulis yang bertujuan untuk menganalisis menganalisis bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Selain itu

Nur Hasanah. "Dampak peristiwa bom Mumbai November 2008 Terhadap Penyelesaian Konflik Kashmir antara India dan Pakistan Periode 2008-2012". Skripsi. UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, Jakarta, 2014.

penulis menggunakan perspektif realisme. Kesamaan antara kedua peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis.

Penelitian kesembilan adalah karya Pushpita Das dalam *Issues in The Management of The India-Pakistan International Border*.³¹ Penelitian ini merupakan jurnal analisis strategi dimana dalam jurnal ini dijelaskan sifat ancaman dan peluang yang dihadapi India di sepanjang perbatasannya dengan Pakistan yang akan memaksanya untuk terus mempertahankan dan mengamankan perbatasannya dari berbagai ancaman yang salah satunya adalah terorisme yang diam-diam disponsori oleh lembaga Pakistan. Penelitian ini sangat membantu peneliti juga dalam menemukan sejarah terjadinya konflik India dan Pakistan.

Penelitian kesepuluh adalah karya Sumit Ganguly, Michal Smetana, Sannia Abdullah dan Ales Karmazin dalam *India, Pakistan, and the Kashmir Dispute: Unpacking The Dynamics of a South Asian Froze Conflict.*³² Penelitian ini merupakan jurnal Asia Eropa dimana dalam penelitian ini membahas tentang Kashmir, bagaimana konflik India-Pakistan menjadi berkepanjangan dan penguraian untuk melemahkan konflik atau bisa disebut resolusi konfik untuk konflik India-Pakistan agar tidak berkepanajangan. Penelitian ini sangatlah membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana resolusi konflik yang cocok untuk diterapkan pada konflik India-Pakistan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

³¹ Pushpita Das. "Issues in The Management of The India-Pakistan International Border" diakses 10 Juli 2014, https://doi.org/10.1080/09700161.2014.895235.

Sumit Ganguly, Michal Smetana, Sannia Abdullah dan Ales Karmazin. "India, Pakistan, and The Kashmir Dispute: UnpackingThe Dynamics of a South Asian Froze Conflict". GmbH Germany (Jerman: 2018).

Pada intinya Tiongkok memberikan respon yang bersifat diplomatik, berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari pencabutan status khusus wilayah yang melibatkan Jammu dan Kashmir. Karena tiap negara juga memiliki tanggung jawab secara internasional untuk tidak mengganggu batas wilayah kedaulatan negara lain. Sedangkan dalam kasus pencabutan status khusus tersebut, Tiongkok merasa menjadi pihak ketiga yang secara tidak sengaja terlibat dikarenakan dalam penentuan wilayah secara geografis yang sempat terjadi konflik bersenjata memberikan dampak yang melewati batas negara hingga Tiongkok.

Penelitian ke sepuluh yang dimuat, adalah karya dari Nur Amani Adi Putri dalam Respon Tiongkok terhadap PenempatanTerminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan (2016-2018). Penelitian ini merupakan skripsi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon Tiongkok dalam menyikapi penempatan THAAD milik Amerika Serikat di Korea Selatan tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan kacamata realism dengan konsep security dilemma dalam realisme dan kepentingan nasional. Berbeda dengan skripsi dilakukan peneliti yang menggunakan konsep kepentingan nasional dengan pendekatan diplomatik.

³³ Nur Amani Adi Putri. "Respon Tiongkok terhadap penempatan terminal high altitude area defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan (2016-2018)". Skripsi. Universitas Lampung. Lampung: 2019.

Penelitian kesebelas adalah Dion Maulana Prasetyo dalam *Strategi Defensip China dalam Merespon Kebijakan AS atas Taiwan*. ³⁴ Penelitian ini adalah artikel yang betujuan untuk mendeskripsikan strategi defensip China untuk merespon kebijakan AS atas Taiwan. dalam penelitian ini China mengambil strategi defensip berdasarkan *offense-defense balance*, disebabkan oleh variabel *defense has advantage* lebih memilih untuk mempertahankan *status quo* daripada maju, menghancurkan dan melakukan reunifikasi secarapaksa dengan Taiwan. Karena bagi China pengalokasian dana untuk bertahan lebih murah daripada menyerang. Bertolak balik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai respon Tiongkok berupa respon diplomatik.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kepentingan Nasional

Konsep ini merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dan dipilih guna memaham bagaimana perilaku suatu negara kepada negara lain di ranah Internasional. Konsep ini juga menjadi salah satu rujukan bagi para perumus kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan dalam pandangan realisme, kepentingan nasional akan selalu dikaitkan dengan *power* yang mana dia memegang peranan penting dalam roda hubungan internasional tetapi berbeda

³⁴ Dion Maulana Prasetya. "Strategi Defensip China dalam Merespon Kebijakan AS atas Taiwan" diakses ejournal.umm.ac.id.

juga dengan pandangan liberalisme yang lebih mementingkan perekonomian suatu negara atau stabilitas ekonomi.³⁵

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari ancaman atau gangguan dari negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan negara serta ambisi suatu negara untuk dapat mempertahankan ekonomi, militer atau budaya negara tersebut. Sedangkan kaitan dengan sifat kepentingan nasional yang fleksibel, tujuan kepentingan suatu negara sewaktu-waktu bisa berubah sesuai situasi dan kebutuhan rakyatnya pada saat itu.

Negara mempertahankan wilayah kedaulatannya agar tidak tergangu atau diganggu oleh negara lain merupakan salah satu kepentingan nasional suatu negara yang patut untuk dipertahankan. Sama halnya dengan kepentingan nasional suatu negara dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan hal penting dalam suatu negara untuk menjamin kesejahteraan dan kebutuhan negara dan masyarakat yang ada didalamnya.

Kepentingan nasional juga dijadikan landasan untuk mengevaluasi atau membuat suatu kebijakan, respon bagi para pembuat kebijakan suatu negara

³⁵ *Ibid.*,35.

³⁶ Hans J. Morgenthau, Another Great Debate, *The National Interest of the United States*, (The American Political Science Review XLVI, 1952), 972

Arry Bainus dan Junita Rachman, "Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional". Jurnal of International Studies Vol. 2. No. 2. (Unpad: Bandung)

³⁸ Hans J. Morgentau, *Politics Among Nations 4th edition* (New York:Alfred A. Knof, 196). 8-9

kepada negara lain. Maka dari itu kepentingan nasional negara satu dan lainnya pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negara masing-masing.

Peneliti memilih konsep ini karena dapat membantu peneliti untuk menganalisa respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India dan dapat mengetahui apa kepentingan Tiongkok sehingga merespon yang sedemikian rupa untuk India.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian kualitatif.

Dengan menerapkan penelitian jenis ini peneliti dapat melakukan riset secara keseluruhan dan mendalam. Sehingga pengetahuan, pemahaman, serta hubungan antar variabel dapat dijelaskan dengan baik. Menurut Jennifer Mason dalam bukunya "Qualitative Research" penelitian kualitatif dapat memadukan bermacam-macam metode yang kompleks, multidimensi untuk menjelaskan suatu kasus.

Sedangkan menurut Creswell penelitian yang diarahkan oleh paradigma kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami permasalahan mengenai manusia atau sosial dengan menciptakan defisi secara menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan

 $^{\rm 39}$ Jennifer Mason, $\it Qualitative~Research,$ (SAGE, 2002). 2

kata-kata, pandangan dari sumber informasi, serta dilakukan dalam lattar (*setting*) yang alamiah.⁴⁰

Definisi penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode dengan mendeskripsikan suatu fenomena internasional yang terjadi. Karena sifatnya yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Berarti ketika hendak melakukan penelitian dalam hubungan internasional maka harus melihat fenomena atau kondisi yang ada dan mengaitkannya dengan teori dalam hubungan internasional.

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah level negara "state". Yang dimaksud penelitian level negara adalah bagaimana menjelaskan perilaku suatu negara ketika dipengaruhi oleh faktor internal negara tersebut dengan memahami bagaimana aktor dalam suatu negara berperan dalam mengambil kebijakan luar negeri.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat sasaran yang digunakan oleh peneliti ada di banyak tempat yang sekiranya bisa membantu peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder. Dalam pengerjaan penelitian, peneliti banyak menulis hasil penelitian di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan Daerah Surabaya, dan Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo.

_

⁴⁰John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: SAGE Publications, Inc, 1994). 162

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengerjaan dimulai pada bulan Januari tahun 2020 hingga Juli 2020. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh bulan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian atau unit analisa adalah subyek yang akan diteliti dan akan dideskripsikan oleh peneliti.41 Dalam karya ini subyek penelitiannya adalah Tiongkok. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah respon Tiongkok pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir.

4. Tahap Penelitian

Berdasar pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peneliti, lebih spesifiknya adalah ada delapan tahap penelitian supaya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang baik. Adapun delapan tahap penelitian tersebut adalah:

1. Memilih Tema, Topik dan Judul

Pada tahapan penelitian ini, peneliti melakukan pra-research penelitian awal sebelum penelitian berlangsung untuk mencari dan meneliti permasalahan yang dianggap menarik serta mampu dikuasai oleh peneliti. Peneliti menemukan dan tertarik perihal permasalahan tentang respon Tiongkok pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir.

⁴¹ Mohtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary*. (Jakarta: LP3ES). 135

Isu mengenai Tiongkok baik dari segi ekonomi, kepentingan nasional serta kebijakan luar negerinya sangat menarik sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana respon Tiongkok pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India atas status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Maka pada tahapan ini, peneliti dapat memilih topik, tema, unit analisa penelitian, dan menemukan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Literatur

Pada tahap studi literatur, peneliti mencari berbagai macam bacaan serta literatur, baik dari media cetak berupa koran, majalah, internet dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi, youtube, video yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Setelah peneliti mempelajari beberapa literatur terkait, serta mencari data dari berbagai sudut pandang yang dianggap tepat, maka peneliti mampu untuk merumuskan masalah yang akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

Setelah peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji atau teliti, peneliti membuat batasan masalah atau konflik yang diangkat, dan menentukan fokus permasalahan, peneliti juga mulai mengumpulkan data baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Pengumpulan data penelitian skripsi dilakukan secara bertahap, tertib,

dan terus menerus sampai data yang telah diperoleh mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. Pengolahan Data

Tahap ini peneliti mengumpulkan data yang bisa didapatkan dari berbagai sumber, literatur, dan peneliti melakukan klarifikasi data yang bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memahami berbagai sumber data yang sudah didapatkan dan sekaligus untuk menganalisa dengan konsep ataupun teori yang akan digunakan.

6. Analisis Data

Sedangkan pada tahap analisis data, peneliti menjawab rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti, kemudian memadukannya dengan konsep ataupun teori sebagai pisau analisa.

7. Kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengambilan kesimpulan maupun poin-poin penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

8. Laporan Penelitian

Tahap ini adalah tahap terakhir dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dimana pada tahapan ini, peneliti membuat pertanggung jawaban berupa laporan atau yang dibuat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti, sebagian besar data yang telah didapat oleh peneliti diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan, pidato, pernyataan resmi dari pihak pemerintahan Tiongkok dan India melalui web pemerintahan kedua negara tersebut sebagai sumber data untuk mengetahui bagaimana Tiongkok merespon atas dicabutnya Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir dan bagaimana India merespon balik Tiongkok.

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui artikel, buku, jurnal, berita baik yang berbentuk cetak maupun internet serta wawancara kepada beberapa dosen hubungan internasional yang ahli dalam bid ang studi Sino-India dan studi Asia Timur sebagai pihak untuk melakukan triangulasi data. Data sekunder juga bermanfaat atau digunakan sebagai data pendukung data primer yang ditemukan.

1. Wawancara

Data wawancara didapat oleh peneliti melalui narasumber yang dianggap mumpuni dan pastinya ahli dalam bidangnya untuk membantu peneliti dalam menjawab maksud dari rumusan masalah yang ditujukan. Menurut Sigh dalam jurnal karya Imami Nur mendefinisikan, wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dengan narasumber untuk menggali informasi yang

diharapkan dan bertujuan untuk mendapatkan data dari narasumber dengan minimum bias dan maksimum efisiensi.⁴²

Wawancara terdapat dua macam yaitu wawancara formal dan informal. Wawancara formal atau terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi dari narasumber dengan menanyakan pertanyaan dengan urut seperti yang sudah disiapkan oleh pewawancara dan direkam dalam bentuk terstandardisasi. Sedangkan wawancara informal adalah wawancara dimana tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan pewawancara berkuasa penuh atas apa yang akan dipertanyakan kepada narasumber. 43

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara terstruktur, pada tahap ini peneliti juga berharap akan memperoleh informasi secara mendalam perihal bagaimana respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019. Peneliti melakukan dua kali wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidang ini.

Wawancara pertama dilakukan via whatsapp sesuai dengan permintaan narasumber. Beliau adalah Ibu Irfa Puspitasari, S.IP., M.A. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dikirim pada hari Rabu 19

_

⁴²Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara". Vol. 11, No.1, Jurnal Keperawatan Indonesia, Universitas Indonesia.

⁴³ Lukman Nul Hakim. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elite". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta. 167-168

Februari 2019 pada pukul 16.21 dan mendapatkan jawaban hari Minggu 23 Februari 2019 pukul 11.09.

Wawancara kedua dilakukan secara email sesuai permintaan narasumber. Beliau adalah Bapak Vincencio Dugis, Ph.D. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dikirimkan ke email beliau vinsensio.dugis@fisip.unair.ac.id pada hari Senin 13 April 2020 pukul 19.04 dan mendapatkan jawaban dari narasumber pada Kamis 16 April 2020 pukul 20.49.

2. Dokumentasi

Selain data yang diperoleh dari hasil wawancara, peneliti juga mengumpulkan data penguat lainya melalui teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya monumental dari seseorang. Menurut Gottschalk dalam jurnal karya Natalina Nilamsari mendefinisikan, dokumentasi merupakan suatu proses pembuktian berupa tulisan seperti surat-surat resmi, surat perjanjian, undang-undang, dan lain-lain, lisan, gambaran atau arkeologis. Menurut atau arkeologis.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber dokumentasi valid yang terpercaya. Proses pengumpulan data menggunakan teknik

-

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010), 240

⁴⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", Vol. XIII, No. 2, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, seperti undang-undang, media cetak atau apapun yang membahas berbagai hal berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, yakni dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalalahan digamabarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga mampu menghasilkan argumen yang tepat dan logis.

Dalam proses analisa data, peneliti mengacu pada kegiatan analisis menurut Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa terdapat tiga alur kegiatan dalam menganalisis data yakni; reduksi data, penyajian data atau verifikasi. Ketiga kegiatan ini berlangsung dengan bersamaan, dimana ketiga dalam kegiatan tersebut saling berhubungan dan berkaitan dalam membentuk proses siklus yang bersifat interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data guna membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.⁴⁶

Reduksi data adalah bagaimana peneliti melakukan proses pada saat menemukan data dari berbagai macam sumber serta memahami, memilah, kemudian menyederhanakannya dan mengabstrakkannya. Pada bagian ini peneliti melakukan pengumpulan data dan akan muncul penelusuran tema,

⁴⁶ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). 16

peringkasan, pengelompokan data. Reduksi data juga merupakan cara peneliti untuk mempertajam penelitian, mengarahkan penelitian dan mengeliminasi data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian sehingga data yang didapatkan dan dikumpulkan benar-benar valid dan akan diambil kesimpulan akhir. Sedangkan penyajian data adalah bagaimana peneliti bisa mencapai analisa yang valid dengan menyajikan berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana tahap ini adalah tahap yang sangat penting tentang makna atau konten dari hasil penelitian yang teruji validitasnya. 47

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau yang bisa dimaksud dengan validitas data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian untuk mengetahui kebenaran suatu data yang didapatkan oleh peneliti. Validitas yang dimaksud adalah sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

Untuk menguji kebsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pengujian triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan

.

⁴⁷ *Ibid*,. 17

cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan analisis data.⁴⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data berupa situs pemerintahan negara, wawancara dengan para narasumber yang ahli dan berita di Internet yang terpercaya dan resmi sehingga informasi yang didapat benar adanya dan valid.

I. ARGUMENTASI UTAMA

Menurut penelitian terdahulu dan konsep-konsep yang digunakannya, penulis memiliki dugaan sementara atas rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahwa Tiongkok merespon negatif pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Ini dilakukan sebagai bentuk mempertahankan kepentingan nasional Tiongkok karena Tiongkok merasa bahwa kedaulatan negaranya terganggu. Segala bentuk respon yang dilakukan Tiongkok merupakan pertimbangan untuk mempertahankan kepentingan nasional yang dimiliki.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian oleh peneliti yang berjudul respon Tiongkok atas Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir tahun 2019 akan disusun menjadi beberapa bab. Berikut akan diuraikan bagaimana sistematika pembahasan di setiap bab:

_

⁴⁸Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. 2010. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif" diakses 17 Juni 2020, https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/traingulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.

Isi pendahuluan yang terdapat pada bab pertama merupakan awal dari penelitian. Bagian ini tidak lain berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kerangka konseptual atau konsep yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan subjek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai landasan berfikir dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan subjek atau variabel penelitian. Selanjutnya, meliputi tahap-tahap penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian, tingkat analisa (level of analysis), Teknis analisa data, Teknik pengujian keabsahan data dan teknik pengumpulan data, argumentasi utama dan sistematika pembahasan dalam melakukan penelitian.

Pada bab dua hingga bab keempat, berisi tentang penyajian data pada bab ini akan mulai memaparkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian pada bab kelima terdapat analisa data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa seluruh data yang sudah diperoleh oleh peneliti dengan konsep atau teori yang akan diterapkan dan sudah dipilih sebelumnya. Pada bab ini, penulis memposisikan konsep sebagai alat dalam mendefinisikan data yang ditemukan oleh peneliti.

Kemudian adalah bab terakhir atau penutup yang mana bagian ini mempunyai isi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Isi dari kesimpulan diambil dari analisis peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan konsep yang telah dipilih oleh peneliti.



BAB II

INTERVENSI TIONGKOK DI JAMMU DAN KASHMIR

A. PEMBAGIAN *LINE OF CONTROL* WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

Sejarah mengatakan bahwa pada tahun 1947, Jammu dan Kashmir adalah negara kepangeranan (*Indian Princely States*) dan terletak di antara India dan Pakistan. Jammu dan Kashmir diberi pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian dari India atau Pakistan. Pada saat itu Hari Singh merupakan penguasa Dogra dan memutuskan Jammu dan Kashmir menjadi mandiri atau tidak menjadi bagian dari India dan Pakistan.

Tetapi ketika salah satu suku Pakistan berusaha menginyasi wilayah tersebut, pada saat itu juga Hari Singh setuju untuk bergabung dengan salah satu negara tersebut yaitu India tanpa persetujuan rakyatnya dan mengirim pasukan untuk melindungi kemungkinan invasi Pakistan. Hari Singh juga menandatangani Pasal 370 yang menjamin otonomi wilayah Jammu dan Kashmir untuk digabung dalam Konstitusi India. Keputusan tersebut yang menyebabkan konflik antara India dan Pakistan dan menempatkan Jammu dan Kashmir sebagai wilayah tersengketakan.

Pada 1948 isu tersebut dibahas pada siding PBB (perserikatan bangsabangsa), kemudian menghasilkan resolusi mengenai konflik di wilayah Jammu

⁴⁹ Tamoghna Halder (Al-Jazeera). 2019. "Sejarah Perjuangan Kashmir dimulai Sebelum 1947 dan Belum Akan Berakhir" diakses 12 Maret 2020, https://www.matamatapolitik.com/perjuangan-Kashmir-bukan-dimulai-tahun-1947-dan-tak-akan-berakhir-sekarang-opini-historical/.

dan Kashmir. Sedangkan hasil dari resolusi DK (dewan keamanan) PBB ke 47 memiliki dua bagian. Bagian pertama dengan meningkatkan kekuatan komisi menjadi lima anggota dan memintanya untuk melanjutkan ke anak benua India dan Pakistan, bagian kedua membahas rekomendasi DK untuk memulihkan perdamaian dan melakukan plebisit.

Resolusi ini melibatkan tiga langkah, antara lain: pertama, Pakistan diminta untuk mengamankan semua suku dan warga negara Pakistan dan mengakhiri pertempuran di negara tersebut. Kedua, India diminta untuk secara progresif mengurangi pasukannya ke tingkat minimum yang diperlukan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Ketiga, India diminta untuk memastikan semua partai politik besar diundang untuk ikut berartisipasi dalam pemerintahan negara bagian di tingkat menteri, yang akan membentuk kabinet koalisi dan India harus menunjuk Administrator Plebisit yang dinominasikan PBB , yang akan memiliki wewenang untuk berurusan dengan kedua negara dan memastikan bahwa plebisit tersebut bebas dan tidak memihak. ⁵⁰

Pada 1949 Perang terbuka akhirnya berakhir dengan membuat garis demarkasi di Jammu dan Kashmir, yang memisahkan daerah sebelah timur (lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh) dijaga oleh pasukan India dan sebelah barat (dikenal sebagai Azad Kashmir) diawasi oleh Pakistan. Dan pada 1950an Tiongkok menjadi aktif di wilayah timur Kashmir.

Pada tahun 1962 Tiongkok mengalahkan India dalam perang dan merebut hampir 20 persen negara kepangeranan. Daerah tersebut disebut Aksai

⁵⁰ UNSCR. "Resolution 47". Diakses22 April 202, http://unscr.com/en/resolutions/47.

Chin dan Tongkok menyangkal kedaulatan India atas wilayah gurun yang dingin. Pada tahun ini juga Tiongkok menguasai bagian timur laut Ladakh. Pada 1963 Pakistan menandatangani perjanjian dengan Tiongkok dan menyerahkan sekitar 2000 mil persegi wilayahnya di Kashmir utara kepada Tiongkok Pada tahun.⁵¹

1965 terjadi perang kembali, membuat India dan Pakistan saling menduduki wilayah masing-masing. India merebut lebih dari 750 mil persegi sementara Pakistan mengambil alih sekitar 200 mil persegi. Kemudian pada 1966 Uni Soviet dan Amerika Serikat meminta PBB untuk melakukan perundingan genjatan senjata di Tashkent (Uzbeklistan). 52

Pada 1974, front oposisi meminta pemerintahan India untuk memberikan sebuah referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk hasil dari perjanjian antara India dan Kashmir. Sedangkan pada saat itu Sheikh Abdulah yang menjadi Menteri utama. Tahun 1989 kelompok militan di bawah kepemimpinan India di wilayah Kashmir untuk menuntut kemerdekaan bagi kelompoknya. Dan India menuduh Pakistan yang telah mempersenjatai kelompok teroris tersebut.

Tetapi pada 2003 Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayye bertemu dengan Presiden Pakistan yaitu Pervez Musharraf di Islamabad untuk menjalin hubungan diplomatik setelah India menyetujui usulan Pakistan untuk melakukan genjatan senjata di wilayah Kashmir. Dan pada 21 Oktober 2008 jalur perdagangan yang melewati batas kekuasaan Kashmir di buka. Tahun

⁵² *Ibid.*. 5.

⁵¹ Commodore Katherina Richards, CSC, RAN. "China-India: An analysis of the Himalayan Territorial dispute" Centre for Defence and Strategic Studies. 2015. 4

2016 India dan Pakistan terlibat perang lagi yaitu perang lisan yang diakibatkan oleh terbunuhnya 18 tentara India dalam serangan pasukan militer di Kashmir yang dikuasai oleh India.⁵³

AFGHANISTAN

Aksai Chin
Shaksam Valley
Azad Kashmir
Northern Areas

Shaksam
Shaksam
Shaksam
Shaksam
Shaksam
Shaksam
Shaksam
Shaksam
Slachen Glacier
Jammu & Kashmir

Northern
Areas

Siachen
Glacier
Slachen
S

Gambar 2. Pembagian line of control Jammu and Kashmir

Sumber: www.mediavigil.com⁵⁴

Pada tahun 1971 Perang antara India dan Pakistan tidak hanya terjadi di Kashmir, tetapi juga terjadi di Pakistan timur. Di wilayah ini, India membantu suatu kelompok di sana untuk bisa merdeka dari Pakistan. Wilayah ini pun berhasil lepas dari Pakistan dan menjadi Bangladesh. Berkurangnya wilayah Pakistan membuat Pakistan semakin fokus dan berambisi untuk merebut Kashmir.

⁵⁴ Shrimayi Nandini Ghost. 2019. "Article 370 and 35A in Historical Perspective Part One." Diakses 7 April 2020 https://mediavigil.com/news-ground-report/article-370-and-35a-in-historical-perspective-part-one/.

⁵³ Anggit Setiyani Dayana. 2019. "Sejarah Konflik Kashmir, Perang Antara India-Pakistan" diakses 15 Agustus 2019, https://ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/sejarah-konflik-kashmir-perang-antara-india-pakistan-efXg

Pasca perang 1971 terjadi dibuatlah garis batas antara tiga negara yang disebut "Line of Control" sebelumnya adalah "Cease-fire Line" yang dibentuk akibat genjatan senjata pasca perang 1947. Dan pada 1972 dibentuknya suatu perjanjian di kota Simla, yang kemudian dikenal dengan "Simla Agreement" dalam perjanjian ini deijelaskan bahwa kedua negara yaitu India dan Pakistan berjanji untuk mencari resolousi konflik secara bilateral tanpa ada campur tangan pihak ketiga seperti PBB. 55

B. KETERLIBATAN TIONGKOK DI JAMMU DAN KASHMIR

Tiongkok merupakan salah satu negara di Asia Timur yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Salah satu pengaruhnya yang sangat terkenal adalah kemajuan ekonominya melalui kegiatan perdagangannya serta proyek-proyeknya. Juga menjadi inspirasi untuk negara-negara lain jika ditinjau dari segi ekonomi. Pengaruhnya juga menyebar tidak hanya di Asia tetapi hampir di seluruh penjuru dunia. Apalagi pada saat ini Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat hingga bisa menjadi inspv irasi bagi negara lain.

Hubungan ekonomi Tiongkok, India dan Pakistan memiliki relasi yang cukup dekat. Tetapi permasalahan mengenai sengketa perbatasan yang berlangsung lama terus mengganggu negara bertetangga tersebut. Permasalahan tersebut muncul Pasca kemerdekaan India pada tahun 1947, India menjadikan Garis McMahon sebagai perbatasan resminya dengan Tibet. Namun setelah invasi Tiongkok tahun 1950 ke Tibet, India dan Tiongkok

⁵⁵ C. Raja Mohan. "Soft Borders and Cooperative Frontiers: India's Changing Territorial Diplomacy Towards Pakistan and China." Journal Strategic Analysis (2007) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700160701353399 datang untuk berbagi perbatasan yang tidak pernah dibatasi oleh suatu perjanjian, apalagi antara rezim pasca-kolonial India dan Tiongkok.

Akibatnya, Tiongkok menganggap McMahon sebagai batas ilegal, Kolonial dan adat sedangkan India dianggap sebagai garis yang menjadi batas internasionalnya. Tiongkok juga tidak konsisten pada kebijakan wilayah Kashmir dengan mengubah posisi perbatasan berdasarkan kepentingannya sendiri. Pada 1957, Tiongkok mengumumkan penyelesaian jalan yang melintasi dataran tinggi Aksai Chin yang diklaim India sebagai wilayahnya dan diklaim juga oleh Tiongkok sebagai bagian dari Tibet bagian barat.⁵⁶

Perang Sino-India atau bisa disebut Perang Indo-Cina dan konflik perbatasan Sino-India adalah perang antara Tiongkok dan India yang terjadi pada 1962. Alasan utama perang ini terjadi yaitu perbatasan Himalaya yang disengketakan. Setelah perang ini terjadi terbentuklah *Line of Actual Control* (LoC) garis demarkasi yang memisahkan India dan wilayah kendali Tiongkok. LoC membagi Jammu dan Kashmir sepanjang 778 km dan terdapat garis perbatatsan sepanjang 198 km antara sebuah daerah bagian India, Punjab, Pakistan. Dan di wilayah Siachen terdapat garis perbatasan sepanjang 150 km yang memisahkan India dan Pakistan. ⁵⁷

Jammu dan Kashmir dikenal dengan tempat yang sangatlah indah.

Terletak di kaki gunung Himalaya dan tidak heran jika wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan. Kini wilayah Jammu dan Kashmir dikontrol oleh

⁵⁷ Pushpita Das. 2014. "Issues in the Management of the India-Pakistan International Border". Vol. 38, No.3, hlm 307-308, Strategic Analysis. Routledge Taylor and Francis Group.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁶ Parjanya Bhatt, 2019 "Revisiting China's Kashmir Policy". ORF Issue Brief No. 326, Observer Research Foundation.

tiga negara yaitu India, Pakistan dan Tiongkok. India disebut sebagai wilayah Jammu dan Kashmir, terdiri dari Baltistan (Kargil, Drass dan Turtuk) dan mengontrol sekitar 45.62% wilayah Kashmir. Pakistan disebut sebagai POK (*Pakistan Occupied Kashmir*) yang terdiri dari wilayah utama Baltistan yang saat ini disebut *Northern Areas* dan sebuah unit administrative yang terpisah bernama Azad Jammu dan Kashmir dan mengontrol 35.155% wilayah Kashmir. Sedangkan, 19.23% wilayah Kashmir lainnya di control oleh Tiongkok, diantaranya adalah Demchok, Shaksgam Valley dan Aksai Chin.

Ada dua permasalahan perebutan perbatasan antara India dan Tiongkok yaitu Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Aksai Chin adalah dataran yang dulu dan sekarang hampir tidak berpenghuni dan salah satu dari dua permasalahan atas perebutan perbatasan antara India dan Tiongkok, terletak di wilayah persatuan India di Ladakh atau wilayah otonomi Xinjiang dan merupakan bagian dari konflik Kashmir. Minat Tiongkok kepada Kashmir berkembang setelah pengembalian Tibet pada 1950 dan klaim terkait Aksai Chin di Ladakh di sisi India Jammu dan Kashmir, Huanza dan lembah Shaksgam di POK (*Pakistan Occupied Kashmir*).

Tiongkok yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa ini jelas mempunyai kepentingan langsung, terutama semenjak Tiongkok mendapatkan persetujuan dari Pakistan untuk menguasai wilayah Aksai Chin yang merupakan wilayah bekas Kashmir. Tiongkok menduduki Aksai Chin pada perang 1962 dan telah mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Pada

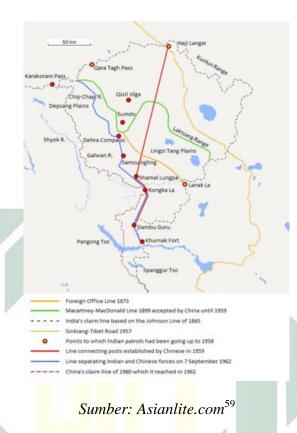
1963 Pakistan menyerahkan sebagian Gilgit-Baltistan ke Tiongkok sehingga memberikan lebih banyak akses dalam Jammu dan Kashmir.⁵⁸

Aksai Chin diklaim oleh dua negara yaitu India dan Tiongkok, Tiongkok ingin mempertahankan status Aksai Chin sebagai bagian dari wilayahnya dengan membawa masalah tersebut pada forum informal DK PBB pada 20 Agustus 2019. Tiongkok menginginkan bahwa pengkliaman wilayah Aksai Chin diakui karena Tiongkok pernah memenangkan perang melawan India dan mengklaim wilayah tersebut. Peristiwa tersebutlah yang membuktikan bahwa Aksai Chin penting bagi Tiongkok.

Sebaliknya oleh India, Aksai Chin adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan karena wilayah tersebut merupakan wilayah bekas kerajaan Kashmir yang diklaim sebagai milik India. Atas dasar tersebut, maka keputusan India mencabut Pasal 370 Konstitusi India jelas mengganggu Tiongkok karena sama-sama mengancam kedaulatannya.

_

Dipanjan Roy Chaudhury. 2019. "China Raked Up Status of Aksai Chin at UNSC Informal Session" (online) diases 23 Maret 2020, https://www/google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unsc-informal-session/amp_articleshow/70747053.cms.



Gambar 3. Peta Aksai Chin

Peta tersebut menunjukkan klaim perbatasan India dan Tiongkok di wilayah Aksai Chin, garis Macartney-MacDonald, garis kantor luar negeri, serta kemajuan pasukan Tiongkok saat mereka menduduki daerah-daerah selama Perang Tiongkok-India.

Tentu dengan timbulnya kasus tersebut menyebabkan timbulnya rasa bersitegang antar negara yang berada pada wilayah geografis Pakistan-India dan merasa terdampak secara yurisdiksi dalam kewilayahannya. Maka dampak ketika timbul reaksi dari negara terdampak secara keseluruhan masing-masing negara hendaknya bersedia untuk saling menyelesaikan konflik dan berupaya

⁵⁹ Asianlite Newsdesk. 2017 "Why China Attacked India in 1962" diakses 7 April 2020, https://asianlite.com/news/asia-diaspora-news/why-china-attacked-india-in-1962/.

mencapai kata damai. Terlebih keterlibatan negara yang saling berdekatan wilayahnya ini akan selalu memiliki urusan hingga kedepannya berkenaan dengan wilayah dan batas negara yang berdekatan. Sehingga peneliti juga sangat menyarankan dalam hal ini segala upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh jika tidak mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan.

C. KEPENTINGAN TIONGKOK DI BALIK OBOR (One Belt One Road)

OBOR (*One belt one road*) adalah kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping di akhir tahun 2013 dan merupakan salah satu bentuk ambisi terbesar kebijkan luar negeri dan ekonoimi Tiongkok . OBOR juga merupakan strategi global Tiongkok yang tidak hanya mencerminkan kekuatannya sebagai raksasa ekonomi dunia dan bertujuan untuk memperkuat kepemmpinan perekonomian Tiongkok melalui program pembangunan infrastruktur di seluruh daerah tentangga negara Tiongkok.

OBOR juga merupakan upaya lebih lanjut untuk mengimplementasikan kekuatannya itu sebagai kekuatan hegemoni dunia. Istilah ini juga berasal dari *'Silk Road Economic Belt' and the '21st-Century Maritime Silk Road'* yang berarti jalur ekonomi sutra darat dan jalur maritim sutra abad 21, konsep ini diperkenalkanoleh Xi Jinping pada tahun 2013.⁶⁰

Pembangunan jalur sutra oleh Tiongkok dianggap dapat meningkatkan jaringan perdagangan dan transportasi di Asia. Tiongkok membagi jalur sutra

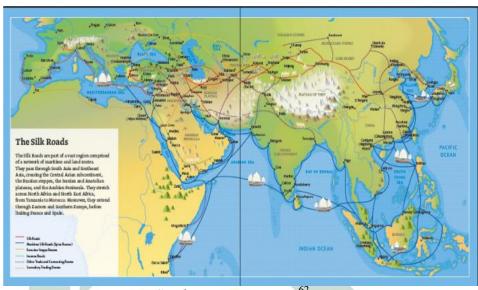
Geoff Wade. "China's One Belt, One Road initiative" diakses 11 April 2020, https://www.aph.gov.au/About_Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/Briefing Book45p/ChinasRoad.

menjadi dua bagian, jalur darat (*Economic Belt*) dan jalur laut (*Maritime Road*). Terdapat 6 internaional koridor dalam OBOR, antara lain: 1. The New Eurasia Land Bridge 2. The China –Mongolia -Rusia Economic Corridor 3. China -Central Asia –West Asia Economic Corridor 4. China-Indochina Peninsular Economic Corridor 5. China –Pakistan Economic Corridor 6.Bangladesh -China -Myanmar Economic Corridor.

Pembangunan infrastruktur jalur darat melingkupi jalan raya, kereta api, bandara, dan infratruktur penting lainnya yang menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah dan Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa. Sedangkan infrastruktur jalur laut meliputi bangunan atau perluasan pelabuhan dan kawasan industri di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Untuk mewujudkan jalur sutra, Tiongkok bersedia menginvestasikan dana kepada negara-negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Proyek infrastuktur Tiongkok ini tergolong sangat besar atau raksasa karena melibatkan hamper seluru negara di dunia. 61

_

⁶¹ *Ibid.*, 7.



Gambar 4. OBOR- Silk Road

Sumber:en.unesco.org⁶²

Selain itu, inisiatif OBOR oleh Tiongkok juga merupakan strategi Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan Bank of China telah dengan jelas mencatat bahwa OBOR dimaksudkan untuk menjadikan renminbi mata uang perdagangan dan investasi utama di negara-negara terlibat. Juga untuk mempromosikan globalisasi ekonomi Tiongkok melalui penciptaan pasar yang besar. 63

Tak hanya itu, bagi Tiongkok wilayah Jammu dan Kashmir penting bagi kelangsungan OBOR. Wilayah Kashmir merupakan dataran tinggi yang punya nilai taktis dalam militer dalam aspek kekuatan darat. Jadi dapat mendukung aspek infrastruktur OBOR (*One belt one road*).⁶⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶² UNESCO. "Silk Roads". diakes 22 April 2020, http://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road.

⁶³*Ibid*, .https://www.aph.gov.au/About_Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBo45p/ChinasRoad.

⁶⁴ Irfa Puspitasari, wawancara oleh Peneliti, 19 Februari 2020.

Juga, salah satu koridor yang dibentuk oleh Tiongkok untuk mencari mitra di negara-negara Asia Selatan adalah melalui koridor Tiongkok – Bangladesh – India – Myanmar koridor ini merupakan koridor yang bisa menjadi ancaman untuk India Juga merupakan proyek utama Tiongkok yang juga dikenal sebagai Inisiatif road belt. Mega proyek yang diupayakan dapat meningkakan konektivitas dan kerja sama di antara negara-negara yang tersebar di Afrika, Asia dan Eropa. 65

Secara historis jalur sutra kuno, OBOR memimpikan serangkaia pembangunan infrastruktur yang akan menyambungkan Tiongkok ke seluruh dunia dengan tujuan untuk menghailkan perdagangan dengan konektivitas lebih besar.

-

Oci Khairani."Kepentingan India Menolak One Belt One Road (OBOR) Tiongkok pada tahun 2017-2019," JOM FISIP Vol.6. (2019). 6

BAB III

PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

A. PENCABUTAN PASAL 370 KONSTITUSI INDIA TENTANG STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

Pasal 370 Konstitusi India merupakan Pasal yang dikeluarkan oleh Presiden India pada tanggal 14 Mei 1954 untuk memberikan hak dan hak istimewa khusus kepada penduduk tetap serta wilayah Jammu dan Kashmir yang memiliki otonomi khusus. Pada 5 Agustus 2019, Presiden India Ram Nath Kovind mengeluarkan perintah Presiden, bahwa semua isi Konstitusi India berlaku untuk semua negara bagian tanpa terkecuali.

Kemudian pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Mentri India Narendra Mondi pada hari senin, 5 Agustus 2019 mengenai pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir. Pencabutan Pasal 370 Konstitusi India dicabut berdasarkan perintah Presiden India. Langkah tersebut dianggap sebuah langkah yang akan menimbulkan kekacauan. Status khusus Jammu dan Kashmir memberikan otonomi luas kepada wilayah dan masyarakat Jammu dan Kashmir. Isi dalam Pasal 370 Konstitusi India adalah:

"370. Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.

(1)Notwithstanding anything in this constitution,-

- (a). The provisions of article 238 shall not apply in relation to the state of Jammu and Kashmir;
- (b). The power of Parliamentto make laws for the said State shall be limited to—
 - (i) Those matters in the union list and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the state, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and
 - (ii) Such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify". 66

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Jammu dan Kashmir mendapatkan otonomi luas serta berhak memiliki konstitusi untuk wilayah sendiri tanpa mengikuti negara lain, bendera sendiri dan memiliki kebebasan menangani semua urusan pemerintah, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi.

Pada Pasal 35 A konstitusi India yang muncul pada 1954 atas perintah presiden berdasarkan Pasal 370 yang memberikan otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir. Pasal 35 A melarang penduduk India dari luar Jammu dan Kashmir menetap di wilayah tersebut secara permanen, membeli tanah,

⁶⁶ The Constitution of India. https://www/india.gov.in. 357

dan menjabat sebagai pegawai pemerintah maupun mendapat beasiswa pendidikan.

Setelah Pasal 370 tersebut dicabut pada 5 Agustus 2019, maka Jammu dan Kashmir akan kehilangan otonominya untuk memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan memiliki kebebasan dalam menangani semua urusan pemerintahan kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi serta penduduk dari seluruh India akan memiliki hak untuk mendapatkan properti dan menetap secara permanen di wilayah tersebut dan harus mengikuti seluruh Konstitusi India tanpa terkecuali. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang mengarah pada transformasi demografis dari mayoritas Muslim menjadi mayoritas Hindu.

B. DAMPAK PENCABUTAN PASAL 370 KONSTITUSI INDIA BAGI TIONGKOK

Dicabutnya Pasal 370 Konstitusi India pada 5 Agustus 2019 menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak seta memicu perhatian Tiongkok yang notabene adalah tetangga terdekat India dan Pakistan. Dimana hal itu ada kaitannya dengan proyek-proyek Tiongkok yang salah satunya adalah OBOR dan juga status kuo control Tiongkok terhadap Kashmir terancam. Tiongkok merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa ini pasti mendapatkan dampak dan mempunyai kepentingan tersendiri.

Wilayah Aksai Chin yang dikuasai oleh Tiongkok dan diklaim oleh India dikarenakan merupakan wilayah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bekas wilayah kerajaan Kashmir menjadi terancam. Atas dasar itulah pencabutan Pasal 370 Konstitusi India sangat berdampak pada Tiongkok dan mengganggu kedaulatannya. Dicabutnya Pasal 370 Konstitusi oleh India diperkirakan merupakan langkah yang akan menambah ketegangan gasris kedaulatan antar negara, garis batas yang memisahkan antara Kashmir yang dikuasai oleh India dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan.⁶⁷

Tiongkok telah menduduki beberapa wilayah di Kashmir yaitu Gilgit-Baltistan dan Aksai Chin yang juga mesih diklaim oleh Tiongkok. Masalah perbatasan memanglah memainkan peran penting dalam hubungan antar negara, kepentingan negara, masalah perbatasan memang penting untuk mempertahankan integritas dan kedaulatan wilayah.

Tiongkok ingin menguasai daerah yang disengketakan. Tiongkok melihat India sebagai pesaing utama yang dapat mengambil peranya sebagai pemimpin regional. Sikap Tiongkok diperbatasan merupakan indikator bahwa mereka ingin mempertahankan klaim teritorialnya dan mencegah India membangun infrastruktur di sepanjang perbatasan. Tiongkok juga telah menyelesaikan jalan di seberang dataran tinggi Aksai Chin karena Tiongkok menganggap bahwa wilayah tersebut bagian dari Tibet, tetapi India mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari wilayahnya.

_

⁶⁷ Ibid. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/

⁶⁸ Albina Muratbekova. "The Sino-Indian Border Issue as a Factor for The Development of Bilateral Relations". R.B.Suleimonev Institute of Oriental Studies, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan. 2017. 11

⁶⁹ Santosh Singh. 2012. "China's Kashmir Policy". Worls Affairs: The Jornal of International Issues", Vol.16, No. 2. 104

BAB IV

STRATEGI DAN RESPON TIONGKOK ATAS PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

A. STRATEGI TIONGKOK DALAM MERESPON PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

Menurut artikel dari John Garver, Tiongkok mempunyai beberapa kebijakan terhadap Kashmir, antara lain:

- 1. Beijing secara resmi menyatakan posisinya terhadap masalah Kashmir
- 2. Demonstrasi dukungan keamanan Tiongkok untuk Pakistan selama periode konfrontasi Pakistan dan India atas Kashmir
- Dukungan kuat dan substansial untuk pengembangan kemampuan industry militer Pakistan terlepas dari konfrontasi dengan India Kashmir
- 4. Sikap Beijing tentang modalitas yang sesuai untuk berurusan dengan masalah Kashmir
- Kepentingan Tiongkok dan kebijakan laten terkait dengan kemungkinan substantive solusi dari masalah Kashmir
- Penggunaan Kashmir oleh orang Tiongkok untuk mencapai pengaruh diplomatik dengan New Delhi dan Washington.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{70}}$ John W. Garver. 2004. "China's Kashmir Policies". India review, vol 3, no.1. Taylor & Francis Inc. 1

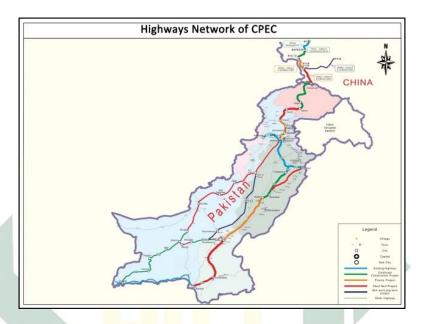
Beberapa kebijakan Tiongkok di Kashmir tersebut merupakan upaya untuk kepentingan suatu negara dan melibatkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan Tiongkok, India dan Pakistan. Hal ini memerlukan upaya untuk menyeimbangkan Tiongkok diantara kedua negara tersebut dan untuk mengikat lebih jauh atas kepentingannya dengan kedua negara tersebut. Tujuan Tiongkok adalah membangun relasi dengan semua negara di Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan.

Di dalam catatan sejarah Tiongkok dan Pakistan memiliki keterkaitan satu sama lain. Ditambah dengan Pakistan pernah memberikan sebagian wilayahnya kepada Tiongkok. Pada proyek OBOR Tiongkok, Pakistan merupakan mitra penting Tiongkok. Tiongkok memberikan investasi sebanyak \$ 90 miliar dalam kerjasama OBOR dan sekitar sepetiganya \$ 27 miliar telah diberikan kepada Pakistan. Tiongkok juga terus memberikan bantuan kepada Pakistan atas upaya keamanan nasional Pakistan terlepas dari hubungan India-Pakistan.

Tidak hanya itu, proyek CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) yang sedang berlangsung. "Jendral Xu Qiliang menyampaikan salam hangat dari Presiden Xi Jinping dan Perdana Mentri Li Keqiang serta menegaskan kembali dukungan penuh Tiongkok untuk Pakistan, khususnya pada saat isu Kashmir

ini" kata kantor PM Pakistan dalam sebuah pernyataan dan dikutip pada laman Anadolu Agency.⁷¹

Gambar 5. Highways Network of CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)



Sumber: cpec.gov.pk⁷²

Disisi lain, Tiongkok selaku tetangga India dan Pakistan juga memberi solusi kepada mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara bilateral. Tiongkok juga keluar melawan terorisme lintas batas pada masalah Kashmir dan mendesak Pakistan untuk menekan aktifitas tersebut. Perpaduan kebijakan ini tampaknya akan melayani kepentingan Tiongkok dengan India dan Pakistan dengan sebagaimana mestinya.

Rizky Jaramaya. 2019."China Tegaskan Dukungan Pada Pakistan Terkait Kashmir" diakses 23 Maret 2020 https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pwxinq366.
 Cpec. "Highways Network of CPEC, Monographic Study on Transport Planning 2013-

^{2030&}quot;diakses 7 April 2020, https://cpec.gov.pk/map/single/1.

B. RESPON DIPLOMATIK TIONGKOK ATAS PENCABUTAN STATUS KHUSUS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

Setelah dicabutnya Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019 berbagai pihak telah merespon hal tersebut, salah satunya adalah negara yang berdekatan dengan India dan Pakistan yaitu Tiongkok. Tiongkok merespon atas terjadinya peristiwa tersebut karena Tiongkok menganggap bahwa dicabutnya Pasal tersebut telah mengganggu kedaulatan wilayahnya dilihat dari segi perbatasan wilayah, dikarenakan apabila Pasal 370 Konstitusi India dicabut maka seluruh wilayah India termasuk Jammu dan Kashmir harus menaati konstitusi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah India.

Sedangkan Tiongkok telah mengklaim bahwa wilayah Aksai Chin adalah milik Tiongkok tetapi India juga mengklaim bahwa Aksai Chin adalah milik India. Dari situlah Tiongkok khawatir bahwa Aksai Chin akan diambil dan dikuasai oleh India. Sedangkan Tiongkok sendiri mengeluarkan beberapa respon atas peristiwa pencabutan Pasal 370 Konstitusi India, antara lain pada saat forum PBB, di berita internasional maupun di web pemerintahan dengan respon diplomatik melalui pernyataan-pernyataan dari Presiden XI Jinping, Menteri Luar Negeri Wang Yi beserta Jubirnya dan dewan Zhang Jun, dewan perwakilan tetep Tiongkok untuk PBB. Respon yang dikeluarkan oleh Tiongkok juga dilakukan tak hanya satu kali tetapi dilakukan beberapa kali.

Respon diplomatik yang dilakukan Tiongkok antara lain, yaitu pada 6 Agustus 2019 dengan langsung merespon isu tersebut. Respon Tiongkok terhadap pengumuman di Delhi berkaitan dengan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir terlihat melalui komentar juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok bahwa Tiongkok menyuarakan posisi yang tegas dan konsisten yang tidak berubah, Tiongkok menganggap bahwa bagian dari Ladakh sebagai wilayah Tiongkok, dan India tidak boleh secara sepihak menciptakan fakta di lapangan melalui hukum domestik.⁷³

Respon selanjutnya yaitu pada 9 Agustus 2019, anggota dewan negara Tiongkok dan Mentri Luar Negeri Wang Yi mengadakan pertemuan dengan Mentri luar negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi di Beijing untuk kunjungan khusus dan darurat. Dalam pertemuan tersebut Wang Yi mengatakan bahwa masalah Kashmir adalah perselisihan yang lahir dari sejarah kolonial wilayah itu dan harus ditangani dengan cara damai sesuai dengan piagam PBB, resolusi yang relevan dari DK PBB. ⁷⁴

Respon Tiongkok berikutnya yaitu pada 16 Agustus 2019, di markas PBB yang terletak New York. Zhang Jun, selaku Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa masalah Kashmir harus diselesaikan dengan baik melalui cara damai sesuai dengan resolusi DK PBB terkait perjanjian bilateral antar kedua negara. Zhang juga menganggap bahwa amandemen konstitusi yang dilakukan oleh India telah mengubah status quo di Kashmir dan menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. Zhang juga mengatakan bahwa langkah India juga telah menentang kepentingan kedaulatan Tiongkok dan

⁷³M.K. Bhadrakumar. 2019. "Bagaimana China Tanggapi Pencabutan Stattus Khusus Kashmir oleh India?" diakses 22 April 2020 https://www.matapolitik.com/bagaimana-china-tanggapi-pencabutan-status-khusus-Kashmir-oleh-india-analisis/.

Huaxia. 2019. "China Calls on Avoidance of Unilateral Actions on Kashmir Issues" (diakses 27 Februari 2020 https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/09/c_138297101.htm.

melanggar perjanjian bilateral tentang menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan. Tiongkok menyerukan kedua pihak untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Selatan, menemukan solusi yang tepat, membuang mentalitas permainan zero-sum serta menghindari aksi sepihak.⁷⁵

Pada 27 September 2019, Wang menegaskan kembali bahwa masalah Kashmir harus diselesaikan secara damai dan benar sesuai yang ada pada Piagam DK PBB dan perjanjian bilateral. Sedangkan pada 28 September 2019 Anggota Dewan Negara dan Mentri Luar Negeri Wang Yi menyerukan menajemen efektif masalah Kashmir untuk menyikapi Debat umum tentang siding ke-74 Majelis umum PBB.

Respon Tiongkok kembali dilakukan pada 11 Oktober 2019 ketika Presiden Tiongkok, Xi Jinping tiba di Chennai, India. Tibanya Xi Jinping di India adalah untuk mengadakan pertemuan dengan PM Narendra Modi untuk membahas mengenai pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir. The Belum cukup itu saja respon yang dilakukan Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India.

Selanjutnya pada 18 Maret 2020, Tiongkok menegaskan kembali bahwa masalah Kashmir adalah perselisihan yang tersisa dari sejarah dan harus diselesaikan dengan baik dan damai berdasarkan resolusi DK PBB dan

⁷⁶ Xinhua. 2019. "FM Calls for Effective Management of Kashmir Issue" diakses 21 April 2020, https://english.www.gov.cn/statecouncil/wangyi/201909/28/content_WS5d8ec6bcc6d0bcf8c4c144 6e.html.

_

⁷⁵ Zx. 2019. "Chinese UN Envoy Calls for Peaceful Means to Resolve Kashmir Issue diakses 27 Februari 2020, https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/17/c_138314890_2.htm.

⁷⁷ Voaindonesia.com.2019. "Presiden China di India di Tengah Ketegangan Soal Kashmir" diakses 11 Maret 2020, https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/511984.html.

perjanjian bilateral. Tiongkok juga menentang tindakan yang sepihak menyulitkan situasi. ⁷⁸



⁷⁸ Xinhua. 2020. "Deepening Comprehensive Strategic Cooperation Between The Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of China". diakses 21April 2020, https://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202003/18/content_WS5e718ebec6d0c2cbe930.html.

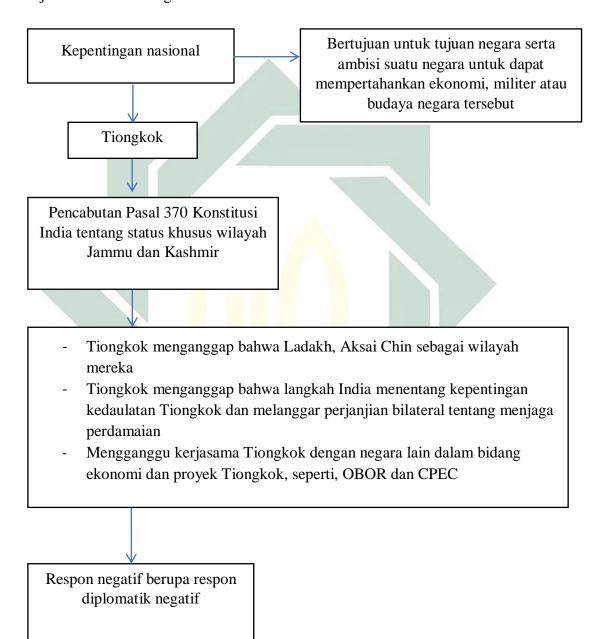
BAB V

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK ATAS WILAYAH JAMMU DAN KASHMIR

Berdasarkan pada berbagai data yang telah dipaparkan dan diperoleh peneliti dalam sub bab sebelumnya. Peneliti memulainya dengan memaparkan berbagai hasil analisa data dengan menggunakan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya peneliti telah meneliti tentang respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir di tahun 2019 . Peneliti menganalisanya secara langsung dengan konsep kepentingan nasional. Seperti data yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir pada tahun 2019 lebih condong pada respon yang bersifat negatif.

Konsep Kepentingan Nasional

Secara ringkas dan singkas, analisa kebijakan negara Tiongkok dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini:



Jammu dan Kashmir wilayah anak benua India di barat laut. Wilayah ini dibatasi oleh wilayah otonomi Uygur Xinjiang di timur laut dan wilayah otonomi Tibet di timur (keduanya bagian dari Tiongkok), sedangkan di selatan berbatasan dengan negara bagian India Himachal Pradesh dan Punjab, di barat berbatasan dengan Pakistan.

Wilayah Jammu dan Kashmir mempunyai luas total sekitar 85.800 mil persegi (222.200 km persegi). Wilayah Jammu dan Kashmir memiliki keuntungan di bidang ekonomi, seperti objek wisata yang indah, pusat industri wol, karpet dan memiliki tanah yang subur. Letak wilayahnya yang strategis juga menjadikannya mempunyai keuntungan geopolitik. Keadaan inilah penyebab Jammu dan Kashmir menjadi subyek perselisihan antara India dan Pakistan sejak pembagian anak benua India pada 1947 hingga saat ini dan tidak heran apabila wilayah ini sangat diperebutkakan oleh negara-negara yang terletak disekitarnya seperti Tiongkok, Iindia dan Pakistan. 79

Konsep yang digunakan peneliti sebagai pisau analisa adalah konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau dengan menggunkan pendekatan diplomatik. Maksud konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh peneliti, konsep kepentingan nasional yang dimaksud didasarkan dari tujuan negara serta ambisi suatu negara untuk dapat mempertahankan ekonomi, militer atau budaya negara tersebut. Kepentingan

⁷⁹ Encyclopaedia Britannica. "Kashmir, Region, Indian Subcontinent, Asia" diakses 12 Maret 2020, https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-indian-subcontinent/The-Kashmir-

problem.

nasional juga bersifat fleksibel, yang berarti dapat berubah dan diubah sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi negara dan masyarakatnya.

Sedangkan pendekatan diplomatik yang digunakan peneliti adalah dengan cara mengetahui dari sisi diplomatik bagaimana Tiongkok merespon pencabutan Pasal 370 Konstitusi India. Dalam kaitannya dengan respon Tiongkok atas pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir, konsep kepentingan nasional tentu saja sesuai untuk diterapkan. Tiongkok adalah salah satu negara di Asia Timur yang berpengaruh di seluruh dunia.

Walaupun Tiongkok terletak di kawasan Asia Timur, tetapi Tiongkok juga berperan di kawasan Asia Selatan bertetangga dengan Pakistan dan India. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Tiongkok memiliki peran penting di kawasan tersebut. Hubungan Tiongkok, India dan Pakistan bisa dikatakan baik, contohnya adalah Tiongkok dan Pakistan mempunyai kerjasama dalam bidang ekonomi yang disebut CPEC (*China-Pakistan Economic Corridor*). Dengan India, Tiongkok juga menjalin kerjasama ekonomi dengan baik.

Tiongkok juga merupakan negara pesaing India di pasar Asia. Kedua negara tersebut adalah negara yang mengalami kebangkitan di bidang ekonomi dilihat dari segi PDB (Produk Domestik Bruto) yang meningkat. Tiongkok melihat bahwasanya India adalah pesaing utama yang dapat mengambil peran

sebagai pemimpin regional dan karenanya ingin mengintimidasi dan mengisolasi India di wilayah tersebut.⁸⁰

Tiongkok menganggap bahwa Aksai Chin sebagai wilayah Tiongkok dan India tidak boleh secara sepihak menentukan hukum domestik. Tiongkok juga menganggap bahwa langkah India telah menentang kepentingan kedaulatan Tiongkok dan melanggar perjanjian bilateral tentang menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan. Maka dari itu bagi Tiongkok, respon negatif berupa respon diplomatik pasca pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir dianggap tepat supaya dapat mempertahankan kepentingan nasional Tiongkok karena Tiongkok merasa bahwa kedaulatan negaranya terganggu.

Respon yang dilakukan Tiongkok untuk India mengenai pencabutan Pasal 370 Konstiusi India merupakan bentuk Tiongkok mempertahankan kepentingan nasional negaranya. Selain pada beberapa alasan yang termuat sebelumnya, alasan yang cukup kuat menjadikan respon Tiongkok sebagai muatan materi utama yakni berdasarkan pada aspek yurisdiksi negara dan tanggung jawab internasional dalam interaksi internasional. Yurisdiksi negara berkaitan dengan kedaulatan negara, dimana tidak dapat dibenarkan perbuatan negara manapun untuk berkegiatan ataupun melaksanakan kekuasaan negaranya dengan melebihi pada batas hingga wilayah negara lain.

_

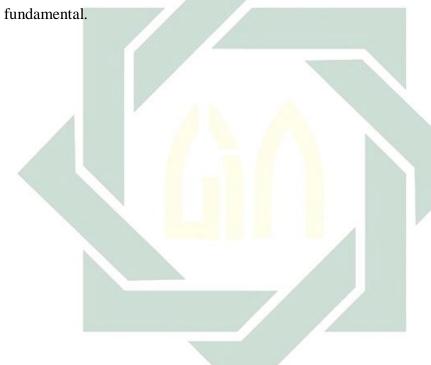
⁸⁰Humphrey Wangke. 2015. "Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB". Vol.VII, No. 07/I/P3DI/April/2015. Pengolahan data dan informasi (P3DI), secretariat jendral DPR RI. 5-6

Prinsip tanggung jawab internasional juga telah diatur mengenai bagaimana peranan tiap negara untuk turut saling menghargai kehormatan negara lain dengan tidak ikut campur urusan negara yang bukan dalam batas kewenangannya. Karena dampak yang bisa muncul akan sangat beragam berdasar pada bagaimana suatu negara terbiasa menanggapi suatu kasus.

Hubungan kerjasama negara, hubungan diplomatik, berpotensi untuk tidak diteruskan atau diperpanjang jika suatu negara memiliki konflik dengan negara lain. Dalam kasus Jammu dan Kashmir yang diperebutkan wilayahnya oleh Pakistan dan Tiongkok ini, negara juga dapat dikenakan *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* jika negara yang terkena dampak nantinya menuntut keadilan dari negara yang menyebabkan timbulnya suatu konflik. Namun yang paling ditekankan oleh peneliti adalah bagaimana negara sebagai subjek hukum internasional selain mampu merepresentasikan negaranya sendiri juga mampu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, dengan menjaga kegiatan negaranya tanpa mengganggu wilayah yurisdiksi negara lain, dan tentunya menyelesaikan sengketa antar negara dengan prosedur yang benar agar tidak memberikan dampak yang merugikan bagi negara lain.

Jika suatu negara berkonflik dengan negara lain, akibat yang ditimbulkan selain merugikan negara itu sendiri secara geografis dan kewilayahan, dampak lainnya yang dapat ditimbulkan yakni akan merenggangnya hubungan diplomatik antar negara yang saling bekerjasama. Sedangkan hubungan diplomatik tidak hanya mencakup pada kegiatan politis dan kewilayahan saja,

lebih dari itu, hubungan ekonomi, kerjasama internasional, dan berbagai aktifitas dalam hubungan internasional lainnya juga dapat berpengaruh jika suatu hubungan antar negara telah didahului dengan adanya konflik. Oleh sebab itu, kerjasama antar negara diperlukan guna tercapainya tujuan negara. Sebab, tidak mungkin suatu negara mampu mencapai tujuan negaranya tanpa bantuan negara lain. Relasi dan kerjasama antar negara menjadi hal yang



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penyajian dan analisa data yang termuat dalam bab IV bisa disimpulkan bahwa respon Tiongkok atas pencabutan Pasal 370 Konstitusi India tentang status khusus wilayah Jammu dan Kashmir cenderung mengarah pada respon diplomatik yang bersifat negatif. Respon diplomatik negatif yang dilakukan Tiongkok terlihat ketika juru bicara Kemenntrian Luar Negeri Tiongkok menyuarakan bahwa India tidak boleh secara sepihak menciptakan fakta di lapangan melalui hukum domestik karena Tiongkok menganggap bahwa wilayah bagian dari Ladakh, Aksai Chin sebagai wilayah Tiongkok dan menganggap bahwa pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir telah mengganggu wilayah kedaulatan Tiongkok dan melanggar perjanjian bilateral tentang menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan

Dalam konsep kepentingan nasional perspektif realisme, negara adalah satu-satunya aktor, keputusan luar negeri yang hanya mengakui "negara" merupakan satu-satunya entitas. Kepentingan nasional juga merupakan kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki dan bagaimana suatu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan kepentingan atau keinginan mereka masing-masing serta dapat menimbulkan rasa aman di negara meraka.

Respon yang dilakukan Tiongkok terhadap pencabutan status khusus wilayah Jammu dan Kashmir merupakan wujud dari kepentingan nasional

Tiongkok yang harus dipetahankan. Oleh karena itu Tiongkok mendesak agar konflik India-Pakistan segera diselesaikan secara damai dan benar sesuai Piagam DK PBB dan perjanjian bilateral agar tidak lagi mengganggu keamanan dan wilayah kedaulatan Tiongkok.

B. SARAN

Mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan, harapannya dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, serta pemahaman terutama masukan dalam memberikan respon konflik yang terjadi di suatu negara agar negara kita tetap aman. Semoga ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam penulisan penelitian ini, mampu menjadi referensi dan sumber bahan penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang ditulis oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman sebuah penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan terkait dengan bagaimana negara Indonesia merespon adanya konflik yang terjadi di negara lain khususnya konflik antara India dan Pakistan yang sudah lama terjadi hingga saat ini. Serta sebagai rujukan bagaimana merespon konflik yang terjadi di negara lain tanpa merugikan negara sendiri dan mementingkan kepentingan nasional negara sendiri. Peneliti sangat menyadari bahwa terdapat kekurangan pada penelitian yang dilakukan, maka apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya memberikan data yang lebih banyak sehingga informasi yang akan diperoleh lebih banyak pula.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

- Dugis, Vincencio. Ph.D. Dosen Universitas Airlangga. Wawancara pribadi peneliti. Pada tanggal 13 April 2019.
- Puspitasari, Irfa. S.IP., M.A. Dosen Universitas Airlangga. Wawancara pribadi peneliti, Pada tanggal 19 Februari 2019.

Buku

- Bradshaw Dkk, Contemporary World Regional Geography, McGraw-Hill, New York: 2007.
- Charles, R. Beitz. *Political Theory and International Relations*, New Jersey: Prnceton University Press, 1968.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches,
 California: SAGE Publications, Inc, 1994.
- Gupta, Sisir. *Kashmir a Study in India-Pakistan Relations*, New Delhi: The India Council of world Affair, 1967.
- Mas'oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary. Jakarta: LP3ES.
- Mason, Jennifer. Qualitative Research, SAGE, 2002.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

- Morgenthau, Hans J., *Politics Among Nations 4th edition* (New York: Alfred A. Knof, 196).
- Morgenthau ,Hans J., Another Great Debate, *The National Interest of the United States*, (The American Political Science Review XLVI, 1952).
- Musidi. India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2010).

Web Instansi Pemerintah

- Akhtar, Rais, William Kirk. 2019. "Jammu and Kashmir" diakses 6 Desember 2019 https://www.britannica.com/place/Jammu-and-Kashmir.
- Al-Kausar, Wildan. 2018. "Respon Masyarakat Kota Malang terhadap City Branding Indah Malang" diakses 23 November 2019 Eprint.umm.ac.id
- Asianlite Newsdesk. 2017 "Why China Attacked India in 1962" diakses 7 April 2020, https://asianlite.com/news/asia-diaspora-news/why-china-attacked-india-in-1962/.
- Bhadrakumar, M.K. 2019. "Bagaimana China Tanggapi Pencabutan Stattus Khusus Kashmir oleh India?". Diakses 22 April 2020, https://www.matapolitik.com/bagaimana-china-tanggapi-pencabutan-status-khusus-Kashmir-oleh-india-analisis/.
- BBC News. 2019. "Kashmir Territories Profile" diakses 30 Januari 2020, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11693674.

- BBC News 2019. "Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters" diakses 6 Desember 2019 https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india.
- BBC.news. 2019. "Mengapa Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India dianggap Kontroversial? Tiga yang Layak diketahui" diakses 4

 Desember 2019 https://mww.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/
- Burhan Hakim, Ahmad. 2015. "Analisa Konflik Perbatasan (Khasmir) India-Pakistan" diakses 9 Desember 2019, https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/www.burhanh ernandez.com/analisa-konflik-perbatasan-khasmir-india-pakistan.
- Chaudhury , Dipanjan Roy. 2019. "China Raked Up Status of Aksai Chin at UNSC Informal Session" diakses 23 Maret 2020, https://www/google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/politics-and-nation/china-raked-up-status-of-aksai-chin-at-unsc-informal-session/amp_articleshow/70747053.cms.
- Cpec. "Highways Network of CPEC, Monographic Study on Transport Planning 2013-2030" diakses 7 April 2020. https://cpec.gov.pk/map/single/1.
- Das, Pushpita. "Issues in the management of the India-Pakistan International border" diakses 10 Juli 2020 https://doi.org/10.1080/09700161.2014.895235.
- Dayana Anggit Setiyani. 2019. "Sejarah Konflik Kashmir, Perang Antara India-Pakistan" diakses 15 Agustus 2019,

- https://ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/sejarah-konflik-kashmir-perangantara-india-pakistan-efXg
- Encyclopaedia Britannica. "Kashmir, Region, Indian Subcontinent, Asia" diakses

 12 Maret 2020, https://www.britannica.com/place/Kashmir-region-indian-subcontinent/The-Kashmir-problem.
- Ghost, Shrimayi Nandini. 2019. "Article 370 and 35A in Historical Perspective Part One." Diakses 7 April 2020 https://mediavigil.com/news-ground-report/article-370-and-35a-in-historical-perspective-part-one/.
- Halder, Tamoghna (Al-Jazeera). 2019. "Sejarah Perjuangan Kashmir dimulai Sebelum 1947 dan Belum Akan Berakhir" diakses 12 Maret 2020, https://www.matamatapolitik.com/perjuangan-Kashmir-bukan-dimulai-tahun-1947-dan-tak-akan-berakhir-sekarang-opini-historical/.
- Huaxia. 2019. "China Calls on Avoidance of Unilateral Actions on Kashmir Issues" diakses 27 Februari 2020 https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/09/c_138297101.htm.
- Jaramaya, Rizky. 2019."China Tegaskan Dukungan Pada Pakistan Terkait

 Kashmir" (online) diakses di

 https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pwxinq366 pada 23

 Maret 2020
- Matapolitik. 2019. "Pencabutan Pasal 370: Ketika Kashmir Tak Lagi Istimewa" diakses 4 Desemer 2019. https://www.matapolitik.com/cabut-pasal-370-ada-apa-dengan-Kashmir-dan-signifikansi-bagi-pakistan-news/.

- Matapolitik. 2019. "Dibanding India dan Pakistan, China Lebih Paham Risiko di Kashmir" diakses 4 Desember 2019, https://www.matapolitik.com/bukan-india-atau-pakistan-china-tampak-lebih-paham-risiko-di-Kashmir-analisis/.
- National portal of India. 2015. "Constitution of India (Full Text)" diakses 27

 Januari 2020 https://www.india.gov.in/gsearch?s=370&op=cari.
- Panda, Suryawijaya. 2019. "Sejarah Konflik India-Pakistan, Mengapa Keduanya Memperebutkan Kashmir" diakses 4 Desember 2019

 https://www.google.com/amp/dunia/sejarah-konflik-india-pakistan-mengapa-keduanya-memperebutkan-Kashmir.html.
- Raharjo, Mudjia, M.Si. 2010. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif" diakses 17

 Juni 2020, https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/traingulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.
- UNSCR. "Resolution 47". diakses 22 April 2020, http://unscr.com/en/resolutions/47.
- Voaindonesia.com.2019. "Presiden China di India di Tengah Ketegangan Soal Kashmir" diakses 11 Maret 2020, https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/511984.html.
- Wade, Geoff. "China's One Belt, One Road initiative" diakses 11 April 2020, https://www.aph.gov.au/About Parliamentary Departments/Parliamentary
 Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad.

- Xinhua. 2020. "Deepening Comprehensive Strategic Cooperation Between The Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of China" diakses

 21 April 2020,

 https://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202003/18/conte-nt_WS5e718ebec6d0c2cbe930.html.
- Xinhua. 2019. "FM Calls for Effective Management of Kashmir Issue" diakses 21

 April 2020,

 https://english.www.gov.cn/statecouncil/wangyi/201909/28/content_WS5d_8ec6bcc6d0bcf8c4c1446e.html.
- Zx. 2019. "Chinese UN Envoy Calls for Peaceful Means to Resolve Kashmir Issue" diakses 27 Februari 2020, https://www.xinhuanet.com/english/2019-08/17/c_138314890_2.htm.

Jurnal

- Bainus, Arry dan Junita Rachman, "Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional". Jurnal of International Studies Vol. 2. No. 2. (Unpad: Bandung).
- Bhatt, Parjanya. 2019 "Revisiting China's Kashmir Policy". ORF Issue Brief No. 326, Observer Research Foundation.
- Das, Pushpita. 2014. "Issues in the Management of the India-Pakistan International Border". Vol. 38, No.3, hlm 307-308, Strategic Analysis. Routledge Taylor and Francis Group

- Garyer, John W. 2004 "China's Kashmir Policies" India review, vol 3, no.1.

 Taylor & Francis Inc. 1
- Nilamsari, Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", Vol. XIII, No. 2, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Singh, Santosh. 2012. "China's Kashmir Policy". Vol.16, No. 2. Worls Affairs:

 The Jornal of International Issues"
- Khairani, Oci."Kepentingan India Menolak One Belt One Road (OBOR)

 Tiongkok pada tahun 2017-2019," JOM FISIP Vol.6. (2019).
- Mohan, C. Raja. "Soft Borders and Cooperative Frontiers: India's Changing

 Territorial Diplomacy Towards Pakistan and China."Journal Strategic

 Analysis (2007)"

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700160701353399.
- Rachmawati, Imami Nur, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara". Vol. 11, No.1, Jurnal Keperawatan Indonesia, Universitas Indonesia.
- Rizky, Alfy. 2016. "Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013" JOM FISIP Vol 3 No.2 .1 Universitas Riau
- Wangke, Humphrey. 2015. "Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB". Vol.VII, No. 07/I/P3DI/April/2015 hlm 5-6. Pengolahan data dan informasi (P3DI), secretariat jendral DPR RI.

Artikel

- Ganguly, Sumit, Michal Smetana, Sannia Abdullah dan Ales Karmazin. "India, Pakistan, and The Kashmir Dispute: UnpackingThe Dynamics of a South Asian Froze Conflict". GmbH Germany, Jerman: 201
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elite".

 Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat

 Jendral DPR RI, Jakarta.
- Information Service of India, "Masalah Kashmir", Djakarta: Information Service of India.
- Katherina, Commodore Richards, CSC, RAN. "China-India: an Analysis of The Himalayan Territorial Dispute" Centre for Defence and Strategic Studies. 2015.
- Mashad, Dhurorudin, "Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Monika krisna dan Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd. "Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)". Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2017.
- Muratbekova, Albina. "The Sino-Indian border issue as a factor for the development of bilateral relations". R.B.Suleimonev Institute of Oriental Studies, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan. 2017.

Katherina, Commodore Richards, CSC, RAN. "China-India: an Analysis of The Himalayan Territorial Dispute" Centre for Defence and Strategic Studies. 2015.

Skripsi, Thesis, Disertasi

- Alhayyan, Riadhi. "Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir dalam Perspektif Hukum Internasional". Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Hasanah, Nur. "Dampak Peristiwa Bom Mumbai November 2008 terhadap Penyelesaian Konflik Kashmir antara India dan Pakistan Periode 2008-2012". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Kurniawan, Heri. "Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)", Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Merindo, Reksi. "Analisis Respon Tiongkok dalam Sengketa Program Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018)" skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Putri, Nur Amani Adi. "Respon Tiongkok terhadap Penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Korea Selatan (2016-2018)". Skripsi. Universitas Lampung, 2019.